



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pojok Rektor #7



MENJAGA AKAL SEHAT KAMPUS

Fathul Wahid

Pojok Rektor #7

Menjaga Akal Sehat Kampus

Fathul Wahid

Universitas Islam Indonesia
2025



Menjaga Akal Sehat Kampus

Fathul Wahid

Hak cipta (c) 2025, ada pada Penulis. Diizinkan menyalin dan atau mendistribusikan ulang konten buku untuk keperluan non-komersial dengan menyebutkan sumber.

Cetakan 1

Desember 2025

ISBN: 978-634-245-040-6

E-ISBN: 978-634-245-041-3

Diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta, 55584

Telepon: (0274) 898444 ekstensi 2301

Email: penerbit@uii.ac.id

Anggota IKAPI Yogyakarta

Kata Pengantar

Dua perasaan hadir bersamaan dan sulit dipisahkan. Kebahagiaan menyertai terbitnya buku *Pojok Rektor* yang ketujuh, sebagai penanda kesinambungan ikhtiar intelektual yang terus dirawat. Namun, pada saat yang sama, kesedihan ikut menyelinap, sebab buku ini menjadi edisi kedua yang dibuka dengan sebuah obituarium—sebuah pengingat bahwa perjalanan pemikiran kerap berjalan beriringan dengan kehilangan.

Jika pada edisi keenam kita kehilangan Prof. Azyumardi Azra, kali ini kita ditinggalkan oleh Prof. Salim Said. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, personal, dan bermakna dengan Universitas Islam Indonesia. Jejak pemikiran, keteladanan sikap, serta keberanian mereka dalam merawat nalar publik telah menjadi bagian dari ekosistem intelektual kampus ini. Kerinduan kepada keduanya terasa begitu cepat hadir, sebab figur intelektual publik yang berani, jujur, dan konsisten dalam bersuara kini semakin langka ditemukan. Kehilangan ini bukan semata kehilangan sosok, melainkan juga kehilangan kompas moral dan keberanian berpikir.

Karena itu, bukan tanpa alasan buku ini mengambil judul *Menjaga Akal Sehat Kampus*. Kampus dipahami sebagai

sebuah ekosistem hidup, tempat pengetahuan, nilai, dan kekuasaan saling berkelindan. Salah satu komponen terpenting dalam ekosistem ini adalah para intelektual. Dalam situasi sosial dan politik yang semakin bising, intelektual memikul tanggung jawab untuk menjaga akal sehat—akal yang jernih, merdeka, kritis, dan tidak mudah terseret arus pragmatisme atau kepentingan sesaat.

Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini menyoal beragam isu yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian, semuanya dikaitkan dengan peran intelektual di ruang publik maupun di lingkungan kampus.

Bagian pertama memuat tulisan yang menegaskan peran intelektual sebagai penjaga nilai. Isu-isu tentang etika, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral ditempatkan dalam bagian ini, sebagai fondasi yang tidak boleh diabaikan.

Bagian kedua berisi tulisan yang menyoroti peran intelektual sebagai pengkritik sistem. Keawasan harus terus dijaga, dan skeptisisme perlu senantiasa dirawat. Dalam konteks ini, intelektual hadir sebagai pembongkar mitos, yang tidak mudah puas dengan jawaban sederhana, serta selalu berani mempertanyakan keamanan dan struktur yang dianggap tak tergoyahkan.

Bagian ketiga mendiskusikan beragam isu terkait inovasi, teknologi, dan pembaruan cara berpikir. Di sini, intelektual diposisikan sebagai pengarah masa depan—mereka yang tidak hanya merespons perubahan, tetapi juga berupaya memberi arah, makna, dan kerangka etis atas perubahan tersebut.

Meski dikelompokkan, setiap tulisan tetap dapat dibaca secara terpisah dan berdiri sendiri. Pengelompokan ini lebih merupakan bingkai khayali untuk memudahkan pembaca menelusuri benang merah gagasan yang beragam.

Sebagai sebuah bunga rampai, sangat mungkin pembaca menemukan perulangan gagasan di beberapa bagian. Hal ini mencerminkan konsistensi kegelisahan yang sama dalam konteks yang berbeda. Untuk itu, mohon pemakluman.

Semoga ikhtiar kecil dalam mengikat gagasan-gagasan ini membawa manfaat, memperluas percakapan, serta memantik diskusi lanjutan yang sehat, kritis, dan bermartabat—sebagaimana semestinya kehidupan intelektual dirawat di kampus.

Yogyakarta, 26 Desember 2025

Fathul Wahid

Rektor Universitas Islam Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	7
Salim Said, Teladan Intelektual Publik.....	11
 Bagian 1. Intelektual sebagai Penjaga Nilai	17
1. Kompas Etika	19
Integritas akademik	19
Kalibrasi Kompas	21
Dampak pahit.....	22
2. Tawaduk Intelektual	24
Sombong vs naif.....	25
Sikap wasatiah	26
Dampak personal dan sosial.....	27
3. Kewajiban Fidusia Profesor.....	29
Kewajiban fidusia kepada mahasiswa	29
Kewajiban fidusia kepada publik	30
4. Desakralisasi Profesor	33
Semangat kolegialitas	34
Tanggung jawab publik.....	34
Ikhtiar desakralisasi	35
5. Kebajikan Moral Demokrasi	38
Pembajakan demokrasi	38
Kebajikan moral.....	40
6. Akal Sehat Kaum Terpelajar.....	42
Akal sehat yang tergadai	42

Tugas intelektual	43
Beberapa pertanyaan	45
7. Harmoni Kolegial.....	47
Kontestasi nilai-nilai.....	47
Kolegialitas yang memudar	48
Bagian 2. Intelektual sebagai Pengkritik Sistem	51
8. Jebakan Meritokrasi	53
Meritokrasi dan kesetaraan	53
Cacatan meritokrasi.....	54
Ilustrasi dan pertanyaan.....	55
9. Sembilan Persen	57
Fakta pahit	57
Kompleksitas masalah.....	58
Memperbesar jalan keluar	59
10. Ketimpangan dan Empati.....	61
Memahami ketimpangan	62
Menumbuhkan empati	63
11. Robohnya Kampus Kami	65
Kampus kuburan	66
Gelisah yang tersendat	68
12. Indonesia Sonder Perguruan Tinggi Swasta	71
Beban meringan	71
Potret yang dicari	73
Peran penyanding	74
Kaca mata jernih	75
13. Hukum yang Manusiawi	77
Hukum kontekstual	77
Tirani meritokrasi	79
Epilog	80
14. Mempertanyakan Kemapanan	82
Tidak harus rapi.....	83
Jangan remehkan yang kecil	84
Perubahan tanpa drama	86
Pertanyaan lain	87

15. Membaca Kegelisahan	89
Komitmen membaca.....	89
Perintah membaca	91
16. Yogyakarta Masih (Ny)aman?	92
Citra Yogyakarta	92
Langkah kolektif.....	94
17. Surat Cinta PTS Yogyakarta untuk Mas Menteri.....	96
PTN kini.....	97
Suara PTS	98
18. Kok TikTok Tok	101
Kebohongan itu.....	101
Perhatian bersama.....	102
19. Menegaskan Peran Perguruan Tinggi Islam Swasta .	105
Peran penting inklusif.....	105
Mandiri dan mendunia	106
Peta jalan masa depan.....	107
20. Surplus Perasaan.....	110
Bias konfirmasi	110
Hoaks politik.....	111
 Bagian 3. Intelektual sebagai Pengarah Masa Depan.....	115
21. Kebebasan Sainifik	117
Mendefinisikan kebebasan saintifik.....	117
Beragam argumen	118
Tantangan dan keterbatasan.....	120
22. Menyuarakan Kebenaran, Mengungkap	
Kebohongan	122
Tugas intelektual publik	123
Fakta di lapangan	125
23. Transformasi Digital.....	127
Ijtihad organisasional	127
Masa depan	129
Apresiasi	130

24. Kecerdasan Buatan di Kampus, Mau ke Mana?	131
Sonder konseptualisasi	132
Praktik abu-abu pekat	133
Kepedulian yang diharapkan.....	134
25. Bingkai Berpikir	136
Ilustrasi pembuka	137
Model mental	138
Bingkai keseharian	139
26. Bingkai Berpikir Konterfaktual	141
Hubungan antartitik sebagai sunatullah	141
Kausalitas keputusan.....	142
Berpikir konterfaktual	143
Beberapa ilustrasi	144
Sadat bingkai	145
27. Peran Doktor	147
Peran baru.....	147
Kemampuan adaptasi	148
28. Membingkai Dunia	150
Bingkai pengambilan keputusan	150
Memanfaatkan batasan.....	152
29. Progres Mondial	154
Merawat semangat.....	155
Mobilitas internasional.....	156
Kolaborasi internasional	157
30. Apa yang Kau Cari di UII?	159
Komitmen kelembagaan.....	159
Motivasi personal	160
31. Meninggalkan Jejak	164
Menjalankan peran	164
Konsistensi proses	165
Pandai bersyukur	166
Referensi	169

Salim Said, Teladan Intelektual Publik

Percakapan telepon dengan Prof Salim di akhir Desember 2020 itu terngiang kembali. Nomor telepon tersebut, saya dapatkan dari dua orang terhormat yang mengirimkan di waktu berdekatan: Prof. Didik J Rachbini dan Almaghfurlah Prof. Azyumardi Azra.

Setelah mengirim pesan melalui kanal WhatsApp, saya akhirnya diizinkan untuk menelepon. Beliau hanya mengenal saya lewat perantara Prof. Didik, yang sudah memberi prolog.

Percakapan dengan Prof. Salim pun terjadi dengan sangat hangat dan cukup lama. Hampir 30 menit. Suara di seberang telepon dengan berbagai pertimbangan menjatuhkan pilihan kepada Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai penerima hibah sekitar 10.000 buku koleksi pribadinya.

Sebelumnya, beberapa lembaga pernah sempat menjadi penerima hibah buku tersebut. Tapi, beliau tidak merasa yakin, koleksinya akan mendapatkan penghargaan yang seharusnya. Lembaga pertama agak sembrono memaknai kata "corner" di sebuah perpustakaan. Pimpinan

lembaga yang lain lebih suka bicara unit bisnis kampusnya ketika bersua, dan bukan mendiskusikan sisi keilmuan. Akad hibah dengan lembaga-lembaga itu pun dibatalkan.

Akad hibah dengan UII diteken pada 22 Januari 2021. Koleksi buku secara bertahap dipindahkan ke UII. Pemindahan terakhir dilakukan setelah beliau meninggal dunia. Prof. Didik bertindak sebagai saksi.

Pengiriman 521 pertama buku ke UII terjadi pada pertengahan Februari 2021. Prof. Salim sendiri yang menyisir rombongan buku tersebut. Sebagian besar ini terkait dengan politik Rusia dan film. Beliau pernah mendalami isu ini ketika menjadi jurnalis di sebuah majalah nasional.

Waktu itu, pandemi Covid-19 belum sirna. Protokol kesehatan ketat kami terapkan. Apalagi, Prof. Salim dan istri sudah berumur dan termasuk kelompok rentan.

Bidang kajian beliau bergeser ketika berkesempatan mengambil program doktor di Ohio State University. Risetnya tentang politik militer di Indonesia.

Karenanya tidak mengherankan jika beliau dekat dengan banyak tokoh militer. Sebagian dari mereka merupakan murid Prof. Salim ketika mengajar di beragam forum pendidikan. Foto-foto yang tergantung dinding ruang tamu rumahnya menjadi saksi beragam momen dengan banyak tokoh militer tersebut.

Banyak dari buku koleksi pribadinya tersebut dibelinya ketika bertugas meliputi sebagai jurnalis di luar negeri, sekolah di Amerika, dan menjadi duta besar. Tak jarang, Prof. Salim bercerita bagaimana buku tersebut didapatkan,

termasuk yang dipesan melalui koleganya, sesama duta besar. Sebagian bukunya merupakan koleksi langka.

Di beberapa tahun terakhir, minatnya berubah ke kajian peradaban. Sebuah lembaga bernama Institut Peradaban pun didirikan bersama dengan para koleganya yang mempunyai minat serupa.

Sekitar 5.500 buku sudah tertata rapi di Perpustakaan UII, melalui beberapa kali pengambilan. Pada 10 November 2022, UII mengadakan peresmian pembukaan "Salim Said Corner", bertepatan dengan peringatan ulang tahun Prof. Salim yang ke-79.

Forum tersebut kami dedikasikan untuk beliau. Tema yang kami pilih adalah: apakah mungkin menjadi intelektual di Indonesia. Beliau sepakat.

Banyak tokoh hadir dalam acara tersebut. Termasuk di antaranya adalah Prof. Didik, Dr. Dipo Alam, Prof. Mohtar Mas'oed, Suwarsono Muhammad, Almaghfurlah Muhammad Ichsan Loulembah, Agus Abubakar, Nurul Agustine, Fathorrahman Fadli, Yunarto Prijopranoto, dan Tarli Nugroho.

Beliau telah menjadi teladan menjaga intelektualisme dengan terus bersuara ketika melihat ketidakberesan dalam praktik berbangsa dan bernegara. Buku-buku yang ditulisnya, tulisan yang tayang di beragam media, dan juga kehadirannya di banyak forum diskusi menegaskan posisi itu. Semuanya itu dilakukan dengan konsistensi tinggi.

Dalam satu setengah tahun terakhir, sejak 2023, Prof. Salim menjadi profesor tamu di Program Studi Hubungan Internasional. Sudah sejak lama, beliau menyampaikan kepada saya, ingin menjadi dosen UII.

Di usianya yang sudah 80 tahun, memorinya masih cemerlang, analisisnya tetap tajam, semangatnya ketika mengajar hampir tak pernah pudar. Beliau sangat teatrikal ketika tampil di depan forum. "Saya tidak suka mengajar secara daring", katanya suatu ketika kepada saya di ruang kerjanya yang terletak di lantai dua kediamannya.

Dari beberapa kali kunjungan Prof. Salim ke UII, saya melihat beliau menggemari makanan tradisional. Nagasari tradisional, bukan yang sudah diimprovisasi rasa dan kemasannya, dipastikan selalu tersedia ketika beliau berkunjung ke UII. Saya personal selalu sempatkan menyapa beliau ketika di UII yang sering didampingi Ibu Hera, istri beliau, meski kadang hanya beberapa saat.

Ketika bertamu ke kediaman beliau bersama Prof. Didik, kami disuguhi makanan yang mengingatkannya kepada masa kecilnya di Pare-Pare. Makanan itu dibelinya di sebuah warung yang berlokasi tidak terlalu jauh dari rumah tinggalnya.

Mengapa beliau bersemangat sekali menghibahkan buku?

Kejadian di akhir 1970an, ketika beliau menjadi asisten sutradara Wim Umboh, yang menggerakkannya. Waktu itu

pengambilan gambar dilakukan di rumah mantan pejabat negara zaman Sukarno. Beliau melihat buku-buku koleksi pejabat yang juga intelektual ini terserak tak terawat.

Beliau tidak ingin hal serupa terjadi pada dirinya. UII telah diamanahi merawat buku-buku koleksi pribadinya.

Saya masih teringat permintaan beliau ketika berulang tahun ke-79 di UII. "Jangan doakan saya panjang umur, doakan saya produktif, kasihan Ibu yang sudah repot mengurus saya", begitu kira-kira pintanya.

Sampai usia senjanya, beliau masih sangat bersemangat dalam membaca buku. "Bisa gila saya, jika tidak membaca buku," jawab Prof. Salim, ketika ditanya pada sebuah acara gelar wicara. Girahnya untuk mendokumentasikan pemikiran dalam tulisan juga tak pernah surut. Mengikuti perkembangan dengan terus belajar dan menyebarluaskan gagasan kepada publik luas adalah dua aktivitas yang seharusnya selalu menghiasi hari-hari intelektual.

Saya yakin jejak kebaikan Prof. Salim sebagai intelektual yang teguh, dan warisan karya-karyanya akan menjadi penerang dalam perjalanan menghadap Sang Pencipta. Wakaf buku beliau ke UII, saya percaya, juga akan menjadi pengirim pahala tanpa jeda.

Bagi kita, kerinduan kepada beliau mungkin tidak memerlukan waktu lama, ketika saat ini semakin sulit mencari intelektual publik yang tidak terbeli kepentingan.

Selamat jalan menuju keabadian, Prof. Salim!

Bagian 1

Intelektual sebagai Penjaga Nilai

1. Kompas Etika

Alhamdulillah, hari ini kita kembali menjadi saksi, salah satu kolega kita mendapatkan jabatan baru sebagai profesor. Ini adalah surat keputusan pengangkatan ke jabatan akademik profesor kelima yang diterima oleh Universitas Islam Indonesia (UII) sejak awal 2024. Satu di antaranya kami terima dari Kementerian Agama.

Selamat kepada Prof. Anas Hidayat atas amanah baru ini. Selamat juga kepada keluarga Prof. Anas, Program Studi dan Jurusan Manajemen, dan juga Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Jabatan ini bukan hanya capaian personal, tetapi juga institusional, yang harus disyukuri.

Setiap amanah dipastikan ada tanggung jawab yang melekat padanya. Amanah profesor, sebagai jabatan akademik tertinggi, sudah sewajarnya menuntut peningkatan kualitas kerja, karya, dan sensitivitas akademik terbaik. Ini juga merupakan salah satu cara mensyukuri jabatan ini.

Saya tahu, tentu menyajikan semuanya tidak selalu mudah. Tetapi justru di sanalah konsistensi menjaga integritas akademik diuji.

Integritas akademik

Izinkan di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak untuk sejenak melakukan refleksi terkait dengan integritas akademik. Mendiskusikan isu ini juga bagian mengasah kompas etika kita.

Sebagai halnya pisau, jika teronggok lama di tempat yang kotor, maka akan berkarat, tumpul, dan tidak lagi tajam. Begitu juga kompas etika, ketika saat ini kita hidup di lingkungan yang sering terjebak dalam membenarkan yang biasa meskipun ada pelanggaran etika di sana.

Kita bisa berikan beberapa ilustrasi sebagai pembuka. Pertama, beberapa waktu lalu, media dihebohkan dengan berita produktivitas seorang dosen yang sanggup menghasilkan 160 publikasi hanya dalam beberapa bulan sejak Januari 2024. Capaian tersebut sangat yang tidak wajar, apalagi ditambah dengan isu pencatutan nama dosen lain dari kampus energi jiran tanpa sepengetahuan. Dosen ini pun sudah diberhentikan oleh kampusnya dari jabatan dekan.

Kedua, pada sebuah grup WhatsApp yang saya ikuti, ada sebuah iklan jurnal nasional. Yang membuat saya mengernyitkan dahi adalah narasi yang dibawa. Publikasi yang berbayar semata dimaksudkan sebagai bagian pemenuhan laporan kinerja dosen, yang menjadi syarat perpanjangan tunjangan sertifikasi dosen. Selain itu, iklan tersebut memberikan kalkulasi bahwa biaya yang dikeluarkan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan akumulasi tunjangan sertifikasi dosen selama setahun.

Ketiga, dalam beberapa waktu terakhir, berlalu lalang di lini masa media sosial saya beragam iklan tentang menulis,

baik buku maupun artikel jurnal. Yang ditawarkan adalah penggunaan kecerdasan buatan dalam menulis. "Satu hari satu artikel Scopus", bunyi salah satu iklan. "Menulis buku dengan mudah menggunakan kecerdasan buatan", bunyi iklan lainnya.

Kalibrasi kompas

Bagaimana kita kompas etika kita ketika melihat kenyataan ini? Mari kita lakukan kalibrasi: apakah jarum kompas kita masih sensitif menunjukkan mana arah yang etis dan mana yang tidak?

Apa yang menyamakan ketiga ilustrasi tersebut? Karya akademik tidak lagi dikaitkan dengan pengembangan keilmuan, tetapi sebagai pelengkap tanggung jawab administrasi. Jebakan logika seperti ini saat ini sangat jamak kita temui, ketika kuantitas menjadi raja, karena dipercaya mempengaruhi banyak hal, termasuk pemenuhan kewajiban, akreditasi, dan pemeringkatan.

Kita tidak boleh naif dalam melihat ini. Ini adalah fakta sosial pahit yang kita temukan di lapangan. Sialnya, kita tidak bisa dengan mudah lari dari jebakan tersebut, karena selain dianggap sebagai kelaziman, juga diamplifikasi dengan beragam kebijakan dan petuah di beragam forum.

Karenanya jika tidak dicapai dengan intensi yang benar dan integritas tinggi, pemenuhan kewajiban, akreditasi, dan pemeringkatan akan kehilangan makna. Kualitas menjadi terabaikan. Lebih parah lagi, jika proses tersebut melibatkan pelanggaran etika.

Sialnya, mendiskusikan hal ini dengan mereka yang kompas etikanya sudah bermasalah, hanya akan menjadi debat kusir yang tak berkesudahan.

Dampak pahit

Kompas etika seorang profesor sudah seharusnya lebih sensitif, dan siap menjadi penjurur atau contoh. Tentu, ini bukan berarti, yang belum mendapatkan amanah profesor bisa main hantam kromo dengan mengabaikan integritas akademik.

Dampak pahit dari pengabaian integritas akademik dapat sangat akut. Mulai dari maraknya pelacuran akademik sampai dengan budaya baru pelecehan ilmu dan ilmuwan. Dan, yang paling menakutkan saya adalah ketika semua itu dianggap wajar.

Tantangan saat ini semakin berat, ketika tekanan produktivitas tidak bisa direspons dengan bijak dan ketika iming-iming penghargaan prestasi disalahpahami. Godaan untuk melewati garis merah pun kadang sulit ditampik dan jalan pintas yang menggadaikan integritas menjadi pilihan. Termasuk di dalamnya adalah dengan menyewa penulis hantu (*ghost writer*) atau menjadi penumpang gelap (*free rider*). Karya akademik yang tidak punya pun tanpa kontribusi memadai dari pendakunya.

Izinkan saya mengajak untuk melakukan refleksi kolektif atas isu ini. Ujungnya adalah koreksi kolektif yang dijalankan dan dilantangkan bersama-sama. Tanpa koreksi ini, saya tidak berani membayangkan masa depan dunia

akademik di Indonesia, yang bisa jadi semakin suram. Tentu, bukan ini yang kita harapkan.

Sambutan pada acara serah terima surat keputusan pengangkatan jabatan akademik profesor atas nama Anas Hidayat, Ph.D. pada 11 Juni 2024.

2. Tawaduk Intelektual

Hari ini, keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) kembali bersyukur atas nikmat yang tak berhenti terlimpah. Kolega kita mendapatkan amanah baru, sebagai profesor: Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Untuk itu, kami mengucapkan selamat atas capaian tertinggi dalam kewenangan akademik ini.

Sampai hari ini, UII mempunyai 38 profesor aktif yang lahir dari rahim sendiri. Ini menjadikan proporsi dosen dengan jabatan akademik profesor mencapai 4,7 persen (38 dari 800 orang). Dari 38 tersebut, proporsi terbesar, sebanyak 11 (atau 28,9 persen) berada di Fakultas Hukum UII.

Saat ini, sebanyak 263 dosen berpendidikan doktoral. Sebanyak 69 berjabatan lektor kepala dan 118 lektor. Mereka semua (187 orang) tinggal selangkah lagi mencapai jabatan akademik profesor.

Selain karena sekarang adalah masa panen dari benih yang sudah ditanam pada waktu lampau, beberapa program percepatan yang didesain dengan mempertimbangkan etika tinggi, alhamdulillah membuahkan hasil. Capaian jabatan profesor bukan hanya merupakan prestasi personal, tetapi juga meningkatkan profil institusi.

Sombong vs naif

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berbagi perspektif dan mengajak hadirin untuk mematangkannya dengan refleksi lanjutan.

Pada medio September 2023, terbit sebuah buku berjudul *Misbelief* dengan anak judul yang jika diartikan berbunyi: apa yang membuat orang-orang rasional percaya kepada hal-hal yang tidak rasional (Ariely, 2023). Penulisnya Dan Ariely, seorang profesor psikologi dan ekonomika perilaku dari Universitas Duke. Profesor Ariely menekuni isu rasionalitas ini sejak lama.

Salah satu buku larisnya yang terbit 15 tahun lalu berjudul *Predictably Irrational* (Ariely, 2009). Isinya sangat menarik karena menjelaskan bagaimana kita mengambil keputusan yang sangat sering sangat tidak rasional.

Kembali ke buku *Misbelief*. Salah satu isu yang dibahas di dalam buku tersebut adalah kerendahhatian intelektual atau tawaduk intelektual (*intellectual humility*). Saya ingin secara tipis-tipis mengelaborasi konsep ini yang diperkaya dengan literatur lain.

Sikap kerendahhatian atau tawaduk yang merupakan titik tengah antara kesombongan, di satu sisi, dan sikap mencela diri sendiri atau minder, di sisi lain. Orang yang tawaduk tidak menghargai dirinya sendiri terlalu berlebihan alias tidak menjadi sombong, dan juga tidak terlalu merendahkan diri sendiri yang memunculkan rasa malu atau minder.

Begitu juga untuk konteks tawaduk intelektual. Ketika tawaduk intelektual hilang, maka orang dapat terjebak dua ekstrem.

Di sisi ekstrem yang satu ada kekeraskepalaan (*stubbornness*) yang tidak mau berubah karena merasa semua pengetahuan yang dimilikinya sempurna dan tanpa cacat. Sikap ini akan melahirkan arogansi intelektual (*intellectual arrogance*) (Church & Barrett, 2016).

Di sisi ekstrem lainnya, ada kenaifan (*gullibility*) yang mudah percaya informasi apa pun yang memaparnya. Sikap ini membuat orang terjebak pada keminderan intelektual (*intellectual diffidence*) (Church & Barrett, 2016). Hal ini menjadi salah satu penjelas mengapa orang rasional dapat percaya hal-hal yang tidak rasional (Ariely, 2023).

Kenaifan ini yang menjadikan seseorang mudah percaya dengan beragam informasi. Inilah juga yang menjadikan disinformasi atau hoaks bisa cepat menyebar luas.

Sikap wasatiah

Tawaduk intelektual adalah pilihan wasatiah antara dua ekstrem tersebut. Ini mirip dengan mengambil sikap berani yang merupakan wasatiah antara takut dan nekat.

Jika tawaduk intelektual dijaga, maka kita terbuka untuk menerima hal baru selama ada dukungan oleh bukti atau argumen. Kita pun tidak pernah mengklaim jika semua pengetahuan yang kita percaya atau produksi bersifat final. Dalam dunia saintifik, kebenaran selalu bersifat nisbi. Ketika ada bukti baru yang tidak mendukung, maka kebenaran

tersebut ditantang: dibatalkan atau diperbaiki. Inilah yang oleh Popper (1963) disebut dengan falsifikasi.

Elemen tawaduk intelektual termasuk asesmen yang akurat terhadap kecakapan dan prestasi, kemampuan untuk mengakui kesalahan, kesenjangan dalam pengetahuan, dan juga keterbatasan-keterbatasan yang terkait dengan diri sendiri. Elemen lainnya adalah keterbukaan terhadap ide baru dan informasi yang mengandung kontradiksi (Whitcomb et al., 2017).

Mereka yang mempunyai tawaduk intelektual biasanya tidak berfokus pada diri sendiri, dan di saat yang sama mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari semesta yang lebih luas. Karenanya, dia akan mengapresiasi manfaat atau nilai dari segala sesuatu dan percaya bahwa setiap orang dapat berkontribusi dengan caranya yang berbeda-beda (Whitcomb et al., 2017).

Dampak personal dan sosial

Menjalankan sikap tawaduk intelektual ini akan membantu membentengi kita dari kecenderungan arogan, otoriter, dogmatis, dan sekaligus dari bias (Porter et al., 2022; Church & Barrett, 2016).

Ada beragam dampak personal lain. Pengamal tawaduk intelektual biasanya mempunyai kepuasan hidup yang lebih baik dibandingkan yang tidak (Grossmann et al., 2020). Mereka juga cenderung lebih aktif mencari pengetahuan baru (Krumrei-Mancuso et al., 2020). Selain itu, tawaduk intelektual juga akan membantu dalam

pengambilan keputusan berdasar informasi yang baik (Leary et al., 2017).

Selain dampak personal, tawaduk intelektual juga mempunyai dampak sosial. Penganutnya cenderung mempunyai sikap toleransi terhadap pandangan berbeda, dan tidak memusuhi kelompok yang berbeda (Krumrei-Mancuso, 2017).

Mereka juga mau mempertanyakan diri sendiri dan mempertimbangkan pendapat tandingan (Colombo et al., 2021). Karena tawaduk intelektual mendukung kohesi interpersonal dan mengurangi kecenderungan untuk menghina liyan ketika beradu argumen, pengamalnya bisa berkawan dengan orang di luar kelompoknya (Porter & Schumann, 2018).

Apa yang saya sampaikan di atas, diniatkan untuk membuka mata kolektif kita dan juga menghangatkan diskusi yang bermakna.

Semoga Allah selalu meridai UII dan kita semua.

*Sambutan acara serah terima Surat Keputusan Profesor untuk
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. di Universitas Islam Indonesia
pada 6 November 2023.*

3. Kewajiban Fidusia Profesor

Dalam sambutan pendek ini, saya akan membahas kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) profesor. Istilah fidusia digunakan di bidang hukum yang merujuk kepada pengalihan hak kepemilikan sebuah benda. Dalam konteks ini ada kepercayaan, seperti arti asal kata fidusia dari bahasa Latin, *fidere* yang berarti "mempercayai". Fidusia adalah konsep relasional karena melibatkan lebih dari pihak.

Hubungan fidusia juga mengandaikan ada penerima manfaat (*beneficiaries*) yang menjadi fokus. Hubungan ini juga dianggap sebagai sesuatu yang berbeda, lebih tinggi, lebih murni, daripada sekedar hubungan kontraktual.

Kewajiban fidusia kepada mahasiswa

Mari, kita terapkan konsep ini dalam konteks pendidikan tinggi. Profesor dan secara luas dosen atau pendidik juga mempunyai hubungan fidusia dengan mahasiswa. Mahasiswa menaruh kepercayaan kepada para pendidik.

Di sini lain, sebagai implikasi, para pendidik mempunyai kewajiban fidusia yang merupakan hutang kepada mahasiswa (Scharffs & Welch, 2005). Kewajiban ini termasuk di antaranya memberikan bimbingan kepada

mahasiswa, memberikan pengajaran yang berkualitas, menyediakan lingkungan pendidikan yang bebas dari rundungan dan pelecehan seksual, dan membentuk suasana kelas yang memandang mahasiswa setara dan bebas dari favoritisme atau jebakan anak emas. Daftar ini tentu bisa diperpanjang.

Juga penting disampaikan di sini bahwa pendidik tidak boleh menggunakan memanfaatkan relasi kuasa dengan mahasiswa untuk kepentingannya (Freedman, 1986). Dalam konteks ini, mahasiswa dalam posisi yang lemah.

Kehadiran para profesor diharapkan memberikan pencerahan kepada para mahasiswa. Peran ini sangat tidak mungkin diwakilkan, dan membutuhkan kehadiran dan interaksi langsung dengan mahasiswa.

Tentu, ada pengorbanan di sini, dari sisi waktu dan energi. Tetapi sekali ini, ini adalah harga layak yang harus dibayar karena mahasiswa (termasuk keluarganya) yang sudah menarik kepercayaan yang sangat tinggi.

Kita tidak mungkin membuat mahasiswa bertepuk sebelah tangan. Kita lengkapi dengan tangan kita supaya suara meriah muncul tapi bertemunya kedua tangan tersebut.

Kewajiban fidusia kepada publik

Apakah hubungan fidusia juga terjadi antara profesor dengan publik? Saya mengajak semua untuk merenungkannya.

Profesor yang menjadi intelektual publik bisa menjadi salah satu penjelmaan karena kesadaran ini. Di sini, kepentingan publik menjadi fokus utama.

Di satu sisi, publik menaruh kepercayaan yang tinggi kepada profesor dan di sisi lain, juga ada "hutang" kepada publik yang harus dibayar oleh para profesor.

Peran intelektualisme publik ini bisa mewujudkan dalam beragam bentuk. Termasuk di dalamnya terlibat aktif dalam penyelesaian masalah publik atau meningkatkan kualitas kehidupan melalui aktivisme bersama organisasi publik.

Selain itu, juga dapat berbentuk ikhtiar mewarnai diskusi di ruang publik terkait isu bersama. Ikhtiar ini dapat disampaikan dalam beragam kanal, termasuk diskusi maupun tulisan populer atau kolom.

Studi yang dilakukan oleh Osborne dan Wilton (2017), misalnya, menemukan beragam alasan mengapa profesor menulis kolom di media populer. Beberapa yang mengemuka termasuk bahwa kolom akan memberikan wajah publik bagi kampus dan meningkatkan hubungan positif dengan konteks.

Kolom yang ditulis para profesor juga dipercaya akan memberikan sudut pandang akademik beragam isu yang muncul di media massa, selain juga akan menantang bias konservatisme atau pemahaman yang terlanjut melekat di tengah masyarakat. Dalam bahasa lain, kolom para profesor ini menawarkan perspektif baru yang lebih segar untuk beragam isu.

Responden lain mengatakan, menulis kolom juga sebagai bagian pengabdian kepada publik dengan membayar

kepercayaan yang sudah diberikan kepada para profesor atau pendidik secara luas.

Sekali lagi, apa yang saya sampaikan diniatkan untuk membuka mata kolektif kita dan juga menghangatkan diskusi yang bermakna. Semoga berkenan.

Semoga amanah profesor ini menjadi pembuka berjuta pintu keberkahan, tidak hanya bagi pribadi dan keluarga, tetapi juga institusi dan publik. Sekali lagi, jabatan profesor tidak hanya merupakan prestasi, tetapi juga sekaligus amanah publik yang perlu dijalankan dengan sepenuh hati.

*Sambutan pada acara Serah Terima Surat Keputusan Profesor
pada 5 Januari 2024.*

4. Desakralisasi Profesor

Surat edaran internal di Universitas Islam Indonesia (UII) terkait dengan peniadaan penulisan jabatan dan gelar rektor dalam dokumen tiba-tiba menjadi viral. Kejadian di luar dugaan ini merupakan berkah tersamar yang perlu disyukuri.

Apa pasal? Ikhtiar kecil tersebut oleh banyak kalangan, termasuk warganet, dianggap sebagai antitesis dari praktik obral gelar dan jabatan kehormatan oleh beberapa kampus. Praktik ini tak jarang melibatkan pejabat dan politisi, dengan alasan yang sulit dipahami dengan akal sehat.

Menurut kabar termutakhir, proses pengajuan untuk mendapatkan jabatan akademik profesor diduga melibatkan praktik suap dengan nominal yang cukup fantastis. Praktik ini tentu sangat memalukan, di tengah harapan tinggi publik kepada kampus sebagai pengawal moral bangsa.

Surat edaran di atas tentu bukan sekadar instrumen administratif, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Ada beragam alasan yang lebih substantif, meski sudah dapat diduga perspektif ini tidak akan diamini oleh semua profesor. Perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat wajar di alam demokrasi, selama didasari dengan nilai yang baik.

Apa alasan substantif di balik penerbitan surat edaran tersebut? Paling tidak adalah tiga: menumbuhkan kembali semangat kolegialitas, memandang jabatan profesor sebagai amanah publik, dan sekaligus mendesakralisasi jabatan profesor.

Semangat kolegialitas

Semangat kolegialitas ini sudah agak lama terkikis di tengah maraknya praktik neoliberalisme dalam manajemen perguruan tinggi. Salah satu indikasinya adalah kuasa pasar yang menentukan banyak pilihan sikap. Hubungan internal yang dibangun pun melahirkan jarak kuasa yang semakin jauh, antar-jenjang fungsional dan struktural.

Jabatan profesor yang menghuni jenjang fungsional tertinggi akan menambah jarak sosial dalam berinteraksi. Ujungnya adalah budaya feodalisme gaya baru yang mewujud dalam beragam bentuk di lapangan.

Dengan menghidupkan kembali semangat kolegialitas, jarak kuasa sesama kolega akan semakin dekat. Kampus akhirnya dapat menjadi salah satu tempat yang paling demokratis. Para dosen menempatkan diri sebagai kolega intelektual yang mempunyai kedaulatan dalam berpikir dan menyatakan pendapatnya.

Tanggung jawab publik

Betul, profesor adalah sebuah capaian jabatan akademik tertinggi. Tetapi banyak yang lupa bahwa di dalam jabatan itu melekat tanggung jawab publik. Pemahaman ini perlu dilantangkan kembali agar menjadi kesadaran kolektif.

Tanggung jawab publik tersebut dapat termanifestasikan ke dalam beragam peran. Salah satunya adalah intelektual publik. Intelektual tidak boleh menjauh dari urusan publik. Tugasnya, meminjam formulasi Chomsky (2017), adalah menyampaikan kebenaran dan membongkar kebohongan, memberikan konteks kesejarahan, dan mengungkap tabir ideologi dari beragam gagasan yang mengekang perdebatan publik.

Intelektual publik berikhtiar mendekatkan bidang kajiannya dengan kepentingan publik, termasuk juga bersuara terhadap beragam penyelewengan yang muncul. Menurut Chomsky, karena para intelektual ini mempunyai banyak privilese yang dinikmati, maka tanggung jawabnya pun lebih besar dibandingkan mayoritas awam.

Tampaknya mudah untuk bersepakat bahwa, saat ini, semakin sulit mencari intelektual publik yang istikamah. Didorong oleh kegeraman, seorang kawan bahkan berseloroh jika hari-hari ini kita mengalami surplus profesor tetapi di saat yang sama, kekurangan intelektual publik.

Ikhtiar desakralisasi

Saat ini, sebagian kalangan memandang jabatan profesor sebagai sesuatu yang sakral. Banyak orang yang menjadikannya sebagai bagian dari status sosial yang perlu dikejar dengan segala cara, lantas dipamerkan ke ruang publik sebagai kebanggaan. Sebagian banyak diduga menabrak etika. Kalangan non-akademisi, termasuk politisi dan pejabat, pun akhirnya terpincut untuk mendapatkannya.

Karena dianggap sebagai status sosial tinggi, cerita lucu di lapangan pun bermunculan, termasuk kemarahan si empu ketika jabatan tersebut tidak disematkan. Komentar para warganet di beragam linimasa media sosial terkait dengan isu profesor abal-abal menambah daftar kelucuan.

Jika jabatan ini dianggap sakral, maka si empunya seakan menjadi orang suci, yang jika kebablasan, akan menjelma menjadi makhluk yang kalis dari kritik dan kesalahan. Tentu bukan ini yang seharusnya terjadi di dunia akademik. Semua kebenaran bersifat nisbi dan terbuka untuk dikritisi.

Jabatan ini, karenanya, perlu didesakralisasi dengan memutus asosiasinya dengan beragam privilese yang menyertainya, yang sebagian bersifat absurd. Privilese muncul karena adalah legitimasi, yang bersumber dari otorisasi pihak yang lebih berkuasa dan endorsemen dari sekelilingnya.

Peraturan perlu kembali ditata dengan menyuntikkan nilai yang tepat dan menjauhkannya dari kepentingan politik sesaat. Di saat yang sama, penghilangan penulisan jabatan dan pemanggilan dalam interaksi keseharian menjadi salah satu ikhtiar kultural untuk desakralisasi.

Dengan demikian, para pengejar jabatan ini akan diberikan koridor yang bermartabat. Jika mendapatkannya pun si empunya hanya akan merayakan seperlunya dengan penuh kesadaran adanya tanggung jawab publik yang melekat di dalamnya.

Jika kesadaran ini diikuti oleh semakin banyak profesor, tidaklah berlebihan untuk berharap jika gerakan simbolik

dalam surat edaran tersebut, akan semakin melantang dan melahirkan budaya akademik baru yang lebih egaliter. Semoga.

Tulisan ini tayang di kolom Opini Harian Kompas pada 25 Juli 2024.

5. Kebajakan Moral Demokrasi

Kita semua menjadi saksi, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, praktik berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengalami tantangan berat. Episode praktik bernegara, terutama menjelang pemilihan umum, telah memancing kegaduhan yang luar biasa. Suara kritis banyak intelektual lintaskampus saling menguatkan. Suara kritis itu didelegitimasi dan tidak didengarkan dengan serius.

Pembajakan demokrasi

Kita perlu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pembajakan terhadap demokrasi tidak lagi dengan cara kekerasan, penggunaan militer, atau kudeta. Pasca Perang Dingin, di banyak negara, kemunduran demokrasi justru dilakukan oleh pemerintahan terpilih. Demokrasi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Kemunduran demokrasi bahkan dimulai dari bilik pemungutan suara ketika pemilu (e.g. Guriev & Treisman, 2022; Levitsky & Ziblatt, 2018).

Melalui pendirian Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia yang bekerja sama dengan MMD Initiative, kami ingin melantangkan pesan dan mengedukasi publik bahwa pembajakan demokrasi dapat dilakukan dengan modus operandi baru yang mengelabui,

dan karenanya kesadaran baru perlu ditumbuhkan. Praktik bernegara yang berlangsung bisa jadi terlihat legal karena disahkan dengan peraturan dan bahkan upaya tersebut dikesankan sebagai upaya meningkatkan demokrasi.

Dalam bahasanya Levitsky dan Ziblitz (2018) dalam bukunya *How Democracies Die*, "Autokrat terpilih memelihara bungkus demokrasi, tetapi menggerogoti substansinya."

Kesan itu digaungkan dengan menguasai narasi publik dan memutarbalikkan fakta. Inilah yang oleh Guriev dan Triesman (2022) disebut sebagai kemunculan autokrat informasi (*informational autocrat*) yang kemudian digantinya istilah tersebut dengan diktator pemutarbalik fakta (*spin dictator*).

Mereka adalah para pencabut ruh demokrasi yang sejati, meski label demokrasi tetap dipakai karena mereka berpura-pura bersikap demokratis. Diktator jenis ini tidak menebar teror dan kekerasan. Diktator varian ini bahkan dicintai dan tidak ditakuti karena mereka populer dan menggunakan beragam sumber daya untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Mereka juga menghindari represi kekerasan secara terbuka.

Dalam iklim demokrasi seperti ini, media masih menulis tetapi sejatinya mereka telah terbeli atau ditekan supaya melakukan sensor internal. Warga negara masih terus memberikan kritik kepada pemerintah, tetapi suara mereka tidak didengar dan dijadikan konsiderans dalam pengambilan kebijakan (e.g. Levitsky dan Ziblitz, 2018).

Kebajikan moral

Kampus sebagai bagian masyarakat sipil merasa terpanggil untuk terus menyelamatkan dan menguatkan demokrasi di Indonesia. Masyarakat sipil di Indonesia harus tetap kuat. Menurut Acemoglu dan Robinson (2019:) dalam bukunya *The Narrow Corridor*: "Kebebasan akan muncul dan berkembang jika negara dan warga kuat. Negara yang kuat diperlukan untuk mengendalikan kekerasan, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik yang memberdayakan. Di sisi lain, warga yang kuat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengekang negara. Intelektualisme yang tumbuh di kalangan warga, terutama kaum terpelajarnya, adalah salah satu upaya menguatkan warga."

Karenanya, ruh dari demokrasi harus diselamatkan supaya tidak mati sia-sia dan gentayangan menghantui kita semua. Apa ruhnya? Jika kita lihat "kitab kuning" (*turats*) demokrasi besutan Plato (2012), yang terekam dalam buku *The Republic* yang ditulis pada 360 S.M., negara ideal dibangun atas empat hal: kebijaksanaan, keberanian, disiplin diri, dan keadilan. Bahkan bagian awal buku ini yang merekam diskusi antara Socrates dengan para sahabat dan muridnya adalah tentang keadilan.

Salah satu pesan penting buku ini adalah bahwa kebajikan moral (*moral virtue*) sangat penting dalam menjalankan demokrasi. Agama menempati posisi penting sebagai salah satu rujukan kebajikan moral.

Tanpa kebajikan moral, demokrasi akan cenderung menjadi pengaturan oleh gerombolan yang tidak berpendidikan, dengan para politisi yang menggiring para

pemilih untuk menyampaikan apa ingin mereka dengar untuk tetap menjaga kekuasaan. Bagi Plato, kebajikan moral hanya muncul dari pengetahuan atau pendidikan.

Demokrasi, bagi Plato, merupakan bentuk negara yang paling adil. Secara indah, negara seperti ini: "... bagaikan jubah bersulam yang ditaburi berbagai jenis bunga. Dan hanya kaum perempuan dan anak-anak yang berpikir bahwa keragaman warna adalah sesuatu yang paling menawan, sehingga banyak laki-laki yang menganggap negara ini, yang dipenuhi dengan akhlak dan karakter manusia, akan tampak sebagai negara yang paling adil." (Plato, 2012).

Sekali lagi terima kasih untuk para penasihat, tim ahli, kepala dan semua tim Pusat Studi Agama dan Demokrasi. Kita semua berharap, pusat studi ini dapat memantapkan eksistensinya untuk berandil dalam menyelamatkan dan merawat demokrasi di Indonesia.

*Sambutan pada Peluncuran Pusat Studi Agama dan Demokrasi
Universitas Islam Indonesia, 22 Mei 2024.*

6. Akal Sehat Kaum Terpelajar

Para guru dan senior yang saya hormati. Kang Jana, terima kasih sudah mengundang Universitas Islam Indonesia (UII). Saya mewakili UII. Di sini saya belajar dan menyerap energi positif dari forum mulia ini.

Izinkan saya memulai dengan melakukan pengakuan: latar belakang pendidikan saya informatika dan sistem informasi, agak jauh pokok kajian forum pagi ini: pemilihan presiden tanpa etika dan penegakan hukum. Karenanya, saya tidak akan mengutip pasal dalam sebuah undang-undang, misalnya. Saya akan masuk ke level abstraksi yang lebih tinggi.

Mohon dimaafkan jika apa yang saya sampaikan tidak sangat mendalam. Paparan ini mungkin semacam "curhat" akademik bertema. Yang menguatkan saya juga adalah bahwa pendapat yang mengatakan intelektual kadang harus keluar dari pagar disiplinnya untuk merespons masalah publik.

Akal sehat yang tergadai

Fenomena yang menjadi fokus tampaknya sudah menjadi semacam rahasia publik. Pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, potensi pengabaian

hukum, dan sebagainya. Lembaga negara atau lembaga resmi yang seharusnya meniup peluit belum bergerak juga.

Semua orang yang masih tersisa akal sehatnya, sedikit saja, bisa mengendus dengan mudah.

Kita semua bersyukur dalam beberapa hari terakhir, ruang publik menyambut dengan baik pernyataan banyak kampus, dari seluruh penjuru Indonesia.

Hanya saja, tidak semua kampus mempunyai keberanian menyuarakan karena beragam alasan. Saya tidak tahu persisnya. Beragam spekulasi bisa dibuat. Termasuk di dalamnya, tersandera hutang budi. Pernyataan beberapa pimpinan PT beberapa hari terakhir yang penuh puja puji bisa menjadi indikasi. Ternyata ada "operasi pasar" yang dilakukan oleh oknum aparat.

Tentu kritik tidak berarti tidak mengapresiasi sisi baik kinerja pemerintah. Tentu ada prestasi yang dibukukan. Kita bisa buat daftarnya.

Tetapi, ketika ada praktik berbangsa dan bernegara yang keluar dari koridor, sebagai intelektual yang masih waras akalnya harus mengingatkan. Itulah mengapa dalam tradisi di Indonesia, yang diperingati orang adalah haul, hari kematian, jika berakhir dengan husnul-khatimah. Jika berakhir buruk, saya khawatir, peringatan haul akan kehilangan alasannya.

Tugas intelektual

Dalam konteks, ada isu intelektualisme yang dipertanyakan. Saya ingat tulisan Noam Chomsky (1967), salah satu tugas intelektual adalah mereka yang

menyuarakan kebenaran dan mengungkap kebohongan. Tugas ini tentu dengan risiko.

Saya ingat obrolan personal lewat pesan WhatsApp dengan Prof. Azyumardi Azra Allahuyarham sekitar sebulan sebelum wafatnya. Ketika itu, saya mengingatkan beliau untuk berhati-hati. Ini jawaban beliau

"Saya juga kadang-kadang khawatir karena sering mengkritik secara terbuka di media elektronik dan media cetak. Saya tawakkaltu (alallah) sajalah. ... Bahkan yang terhitung kawan kita dalam barisan kepemimpinan nasional ikut-ikutan menyalahkan mereka yang kritis."

Sebagian kawan terpelajar juga mengatakan, kalau demokrasi mati mengapa orang masih bisa berbicara dan tidak ada yang diproses.

Sebentar. Ini bukan soal kanal bersuara yang dibuka, tetapi bagaimana suara itu secara serius didengar. Suara rakyat tentu bukan sekedar efek suara seperti dalam film-film Hollywood untuk menjadikan adegan lebih kuat tersampaikan. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pelanggaran kekuasaan dan mendapatkan legitimasi hanya karena membebaskan bersuara.

Kalau suara rakyat, tentu termasuk kampus, didengar, saya yakin sudah banyak perubahan yang dilakukan. Tapi kan, di lingkaran kekuasaan juga banyak orang terpelajar. Itulah masalahnya. Terpelajar dan tersadar adalah dua cerita yang berbeda.

Beberapa pertanyaan

Saya jadi bertanya, meminjam istilah William Davies dalam bukunya *Nervous State*, apakah "demokrasi perasaan" (*democracy of feelings*) juga menemukan buktinya di Indonesia? Ini pertanyaan dan saya serahkan jawabannya ke pembaca.

Dalam alam demokrasi jenis ini, perasaan semakin mendominasi keputusan manusia dalam mengambil keputusan. Karenanya, fakta pun dimanipulasi untuk memberikan dampak emosional yang maksimum, dan perasaan banyak orang dimainkan untuk menavigasi perubahan yang diinginkan, meski tidak sejalan dengan akal sehat.

Saya juga teringat bukunya Guriev dan Treisman yang berjudul *Spin Dictators*. Secara sederhana, adalah diktator yang memutarbalikkan fakta. Kediktatoran varian baru ini tidak lagi dilakukan dengan menebar teror atau memanfaatkan aparat, tetapi dengan menguasai narasi.

Diktator jenis ini cenderung populis dan bahkan disukai rakyat. Tapi yang ditampilkan ada sesuatu yang semu belaka karena ada beragam modus yang dilakukan untuk menjadi penjaga gerbang informasi.

Tidak ada kata "Indonesia" dalam buku tersebut. Buku itu terbit 2 tahun lalu, pada 2022. Apakah akan berbeda daftar negara yang masuk di buku tersebut, jika buku ditulis di 2024?

Lagi-lagi, ini sebuah pertanyaan, dan jawabannya saya serahkan ke pembaca yang budiman.

Fenomena diktator gaya baru ini juga terkait erat dengan hasil pengamatan tajam dan refleksi mendalam Sunstein (2021) atas kasus peredaran informasi palsu dan kebohongan yang terjadi di Amerika Serikat. Buku *Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception* merekamnya dengan sangat baik. Informasi palsu atau kebohongan dapat memalingkan orang dari masalah yang seharusnya, membuat kesimpulan yang keliru, mengambil keputusan yang salah, dan mengambil risiko yang tidak perlu.

Ketika membaca buku tersebut, saya merasa familier dengan beragam ilustrasi yang diberikan, layaknya perasaan dejavu. Apakah saya sendirian yang seperti ini? Saya tidak tahu.

Paparan pada diskusi Forum Guri Besar dan Doktor Insan Cita tentang "Pemilihan Presiden Tanpa Etika dan Penegakan Hukum" pada 4 Februari 2024.

7. Harmoni Kolegial

Lingkungan perguruan tinggi berubah. Asumsi yang di waktu lampau masih valid, saat ini kembali ditantang. Banyak di antaranya yang berguguran karena relevansinya memudar. Namun, ada juga asumsi yang tetap relevan dan bahkan perlu lebih ditekankan.

Apa pun perubahan tersebut, seharusnya tidak menjauhkan perguruan tinggi dari nilai-nilai baik yang dirawatnya. Bisa jadi setiap perguruan tinggi mempunyai basis pijakan nilai yang spesifik dan tidak mudah disatukan. Universitas Islam Indonesia (UII) tidak muncul di ruang hampa dan berangkat dari nilai-nilai yang disemai oleh para pendirinya.

Kontestasi nilai-nilai

Sangat mungkin nilai-nilai lama itu dikontestasi dengan nilai-nilai baru. Keduanya tidak selalu kompatibel, dan bisa jadi berseberangan. Jika ini terjadi, perguruan tinggi berada dalam posisi yang tidak mudah. Pilihan ekstremnya adalah mengikuti arus dan mengabaikan nilai-nilai yang diyakini, atau melakukan perlawanan, meskipun kecil, supaya masih bertumbuh dengan tetap memegang nilai-nilai.

Pilihan UII jatuh kepada yang kedua. Tidak semua orang sepakat, dan jujur, termasuk di dalam UII sendiri. Sesuatu yang wajar, asalkan adu argumen akademik sehat yang dikedepankan.

Tentu pilihan itu pun bukan tanda tantangan. Tantangannya adalah bagaimana tetap mendapatkan legitimasi ketika tidak mengikuti logika khalayak. Salah satu pendekatan yang diambil adalah mengedepankan pertumbuhan substantif dengan tetap menjaga nilai-nilai.

Pilihan ini merupakan ikhtiar kembali menegaskan asumsi (baca: nilai-nilai) lama yang masih relevan dan di saat yang sama juga mengadopsi asumsi baru sebagai bentuk respons kreatif. Pilihan ini didasarkan pada prinsip *al-muhafadhatu ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah*, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Salah satu asumsi lama yang ditegaskan adalah kolegialitas, yang dipadukan dengan harmoni.

Kolegialitas yang memudar

Jika mempelajari tata kelola perguruan tinggi yang dijalankan, kita tidak mungkin menafikan nilai-nilai yang mendasarinya. Beragam kategorisasi ditemukan dalam literatur, baik klasik maupun modern.

Kita ambil saja salah satunya. Model tata kelola perguruan tinggi ada yang lebih dominan ke arah akademik, di kelompok satu, dan yang lebih dominan ke korporat, di kelompok lainnya. Distingsi ini pada tataran nilai pijakan

utama. Dalam praktik, sangat mungkin terlihat ada irisan, meski berangkat dari nilai dominan yang berbeda.

Kelompok yang pertama mengedepankan kolegialitas. Dalam konteks ini, kolektivitas dalam pengambilan keputusan penting menjadi budaya. Iklim demokrasi tumbuh subur. Warga kampus tidak takut untuk menyatakan pendapat dengan argumentasi akademik. Namun di saat yang sama, konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, karena dieliminasi oleh komunitas intelektual yang cenderung menjaga harmoni.

Ada dua model yang mungkin dimasukkan ke dalam kelompok kedua, yaitu model birokrasi dan model korporasi. Apa bedanya? Pada model birokrasi, ada pembagian jenjang dan kerja yang saklek. Termasuk di dalamnya adalah ukuran-ukuran administrasi yang kaku. Pendekatan yang digunakan adalah atas-bawah. Pada model korporasi, persaingan pasar dan pemenuhan kebutuhan konsumen sangat dominan.

Tata kelola model korporasi ini tidak dikenal di 1970an, tetapi sudah mendominasi untuk saat ini, terutama di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Mereka sangat berorientasi kepada pasar. Persaingan menjadi konsekuensi logisnya.

Sampai level tertentu, persaingan ini dapat mengabaikan nilai-nilai baik yang seharusnya dijaga oleh perguruan tinggi, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu benteng terakhir moralitas. Nilai-nilai dapat diabaikan untuk memenangkan persaingan, meski dalam banyak kesempatan yang dikhotbahkan adalah kolaborasi. Ini merupakan indikasi hipokrisi yang sangat nyata.

Sialnya, pendekatan ini juga diadopsi di banyak perguruan tinggi di belahan dunia yang lain. Tak ketinggalan juga perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, kebijakan negara pun didominasi pendekatan yang cenderung mengadopsi paham neoliberalisme ini.

Meski banyak kritik dialamatkan kepada tren ini, tetapi tampaknya gaungnya belum cukup membuat perubahan. Penekanan pada ‘harmoni kolegal’ untuk membingkai program di 2024 merupakan salah satu bentuk ‘perlawanan kecil’ UII. Semoga!

Tulisan ini sudah dimuat di UIINews edisi Oktober 2023.

Bagian 2

Intelektual sebagai Pengkritik Sistem

8. Jebakan Meritokrasi

Sudah jamak diyakini bahwa meritokrasi adalah pendekatan yang paling pas untuk proses seleksi atau pengakuan di banyak konteks. Ini berlaku untuk konteks keluarga, kelas di sekolah sampai dengan negara, dan bahkan global.

Meritokrasi dan kesetaraan

Meritokrasi adalah suatu sistem atau filosofi yang didasarkan pada prinsip bahwa keunggulan individu dan prestasi mereka seharusnya menjadi dasar utama untuk pengakuan, promosi, dan penghargaan dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Pendekatan ini sering kali dihadapkan dengan pendekatan lain yang didasarkan pada pertimbangan emosi atau preferensi personal. Dalam pendekatan kedua ini terdapat nuansa subjektivitas karena favoritisme, ketidaksukaan, dan sejenisnya.

Sistem seleksi atau pengakuan berbasis meritokrasi diharapkan akan memberikan keadilan untuk semua, karena prinsip kesetaraan. Semua orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama.

Namun, perlu dipahami bahwa sistem tersebut valid hanya ketika asumsi awal terpenuhi. Jika tidak, maka ada beberapa konsekuensi yang perlu mendapatkan perhatian mereka penganut meritokrasi 'buta' yang tidak melihat konteks.

Cacatan meritokrasi

Beragam kritik atau paling tidak catatan diberikan kepada sistem meritokrasi ini (Sandel, 2020).

Berikut adalah beberapa di antaranya:

Pertama terkait dengan ketidaksetaraan awal. Meritokrasi berasumsi bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan dan pengembangan keterampilan. Namun, di banyak masyarakat, faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi, etnis, dan geografi dapat menciptakan ketidaksetaraan awal yang sulit diatasi.

Kedua adalah soal pelanggaran ketidaksetaraan. Sistem meritokrasi dapat menjadikan ketidaksetaraan tetap ada dan bahkan membesar, karena individu yang sudah memiliki keunggulan awal memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan berkelanjutan.

Ketiga berhubungan dengan kecenderungan mengabaikan aspek kemanusiaan. Fokus yang terlalu besar pada hasil dan keunggulan dapat mengabaikan aspek kemanusiaan seperti keadilan sosial, perawatan terhadap individu yang kurang beruntung, dan kebutuhan sosial yang lebih luas.

Keempat berkaitan dengan jebakan fokus pada hasil singkat. Sistem meritokrasi sering kali fokus pada hasil akhir,

seperti pencapaian kinerja atau penilaian kinerja karyawan. Hal ini dapat mengabaikan proses atau metode yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan perilaku tidak etis atau penyalahgunaan.

Ilustrasi dan pertanyaan

Beberapa ilustrasi bisa diberikan. Misalnya, membandingkan kualitas sekolah di kota besar dengan fasilitas yang lengkap dengan sekolah di pedalaman yang bahkan atap gedungnya bocor, seharusnya menimbulkan pertanyaan.

Ketika seleksi sekolah didasarkan pada prestasi, tidak sulit memprediksi, dengan favoritisme, siswa yang pandai akan cenderung berkumpul di sekolah tertentu. Tentu sebaliknya, sekolah lain akan berisi siswa yang kurang pandai.

Jika kualitas sekolah pun timpang, bisa dibayangkan apa yang terjadi pada tahapan sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Kesenjangan sangat mungkin akan semakin melebar, termasuk dalam akses ke dunia kerja, partisipasi ekonomi, dan juga keterlibatan dalam politik.

Pertanyaan besar: Bagaimana prinsip meritokrasi bisa diadopsi dengan mengurangi masalah ikutannya? Salah satunya dengan pendekatan afirmasi.

Afirmasi dalam banyak konteks bisa menjadi mandat moral untuk menjamin adanya kesetaraan karena asumsi awal sistem meritokrasi tidak valid. Unjungnya adalah inklusivisme, ketika tidak ada orang yang tertinggal di belakang.

Bagaimana konsep ini relevan dengan disiplin masing-masing. Ini ada pekerjaan rumah setiap doktor baru dalam bentuk refleksi yang agak mendalam.

*Elaborasi ringan poin sambutan pada acara penyambutan doktor baru
Universitas Islam Indonesia lulusan 2023, 21 Desember 2023.*

9. Sembilan Persen

Fakta pahit

Persentase dalam judul di atas tidak terkait dengan perolehan suara kontestan pemilihan umum. Angka tersebut adalah proporsi lulusan SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagian besar adalah warga asli, yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dari 100 lulusan, hanya 9 yang berkesempatan kuliah. Sangat rendah.

Boleh tidak percaya, tapi itulah data yang dikoleksi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY. Fakta ini tentu pahit dan karenanya diharapkan menjadi pencelik mata.

Setelah mengetahui fakta ini, sekitar dua tahun lalu, beberapa upaya telah penulis dilakukan. Niat awalnya sederhana: membuat isu ini mendapatkan perhatian bersama secara serius. Penulis menyampaikan isu ini di beragam forum formal dan informal. Termasuk di antaranya dengan para pimpinan perguruan tinggi swasta, anggota parampara praja, Ketua DPRD, dan bupati. Masalah ini juga penulis sampaikan ke anggota DPD RI yang pekan lalu berkunjung ke UII.

Kompleksitas masalah

Tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang rendah ini seakan terkubur di bawah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (APK PT) DIY yang mencapai 74,08 persen (Susenas 2023). Dari 100 pemuda berusia 19 sampai 24 tahun yang tinggal di DIY, 74 orang di antaranya mengenyam bangku kuliah. Tapi, APK PT ini dapat mengecoh. Proporsi ini tidak hanya memasukkan warga asli DIY.

Untuk simulasi, kita anggap angka 9 persen sebagai data 2022. Lulusan SMA di DIY pada tahun tersebut sekitar 53.000. Artinya, kurang dari 4.800 yang kuliah, dan sisanya, lebih dari 48.000 tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka memilih bekerja, berwirausaha, atau aktivitas lain.

Kita bisa bertanya: Apakah mereka tidak melanjutkan kuliah itu pilihan merdeka atau dipaksa keadaan? Tidak ada informasi spesifik soal ini, meski patut diduga, berkaitan dengan masalah ekonomi.

Karenanya, penulis sangat bersyukur, ketika kemarin (20/02/24) Dinas Dikpora DIY meluncurkan beasiswa berkelanjutan untuk pemuda DIY. Memang cacahnya masih kecil, tetapi ini merupakan langkah konkret yang perlu diapresiasi.

Beasiswa kuliah bisa diakses oleh pemuda berusia 18-24 tahun. Besaran beasiswa adalah Rp10 juta per tahun. Pada 2024 ini tersedia 150 paket. Cacah paket ini bertambah jika inisiatif serupa yang dilakukan oleh kabupaten dimasukkan, meski secara agregat sulit dikatakan cukup jika dibandingkan dengan angka 48.000 pemuda yang tidak kuliah setiap tahun.

Kita bisa bayangkan dampak jangka panjang jika masalah ini tidak diatasi. Termasuk di antaranya adalah kemungkinan warga asli terpinggirkan dalam kompetisi untuk mendapatkan berbagai akses, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Salah satu dampaknya lanjutannya adalah ketimpangan sosial antara warga asli dan warga pendatang. Ini menakutkan.

Memperbesar jalan keluar

Jalan keluar permanen perlu dicari bersama-sama. Program intervensi harus menjadi gerakan kolektif. Perguruan tinggi negeri dan swasta yang mampu dapat terlibat. UII, misalnya, mulai 2024, mengenalkan skema beasiswa afirmasi pembebasan uang kuliah untuk warga asli yang tidak mampu. Untuk sementara tersedia 29 paket, satu orang per program studi jenjang diploma dan sarjana.

Sambil menunggu gayung bersambut, pertanyaan banyak pimpinan perguruan tinggi swasta yang sering dititipkan kepada penulis perlu juga disampaikan: Apakah mungkin sebagian dana keistimewaan dialokasikan untuk memperbesar cacah paket beasiswa?

Mari kita simulasikan untuk 1.000 paket per tahun menggunakan standar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Besar uang kuliah tengahan per semester Rp4 juta. Ini artinya perguruan tinggi tetap harus berkontribusi. Bantuan biaya hidup kluster terendah Rp800.000 per bulan.

Untuk 1.000 paket, pada tahun pertama dibutuhkan Rp17,60 miliar. Pada tahun keempat dan seterusnya Rp70,40 miliar untuk 4.000 penerima beasiswa aktif.

Bandingkan dengan dana keistimewaan yang sebesar Rp1,42 triliun. Sebanyak Rp1,07 triliun (75,37%) dialokasikan untuk bidang kebudayaan. Kalau pendidikan tinggi dianggap sebagai bagian penting dari bidang ini, maka sudah sangat klop.

*Tulisan sudah tayang sebagai Kolom Analisis Kedaulatan Rakyat
pada 23 Februari 2024.*

10. Ketimpangan dan Empati

Apakah pernah melihat sebuah meme atau poster yang di media sosial yang menggambarkan seorang ibu dan anak perempuannya melihat seorang pemulung yang sedang mengais sampah?

Dalam meme tersebut, terdapat dua gambar yang disandingkan. Pada keduanya, Si Ibu yang digambarkan cukup kaya, memberikan nasihat kepada anak perempuannya.

Pada gambar pertama, sambil menunjuk kepada pemulung, Si Ibu mengatakan, "jika kamu tidak rajin belajar, maka kami akan berakhir seperti dia". Apakah ada yang salah dalam nasihat seperti ini? Sebagian dari kita akan berpendapat untuk setuju dengan Si Ibu. Ini adalah nasihat yang jamak kita dengar.

Kita simpan dulu jawaban tersebut.

Pada gambar kedua, dengan pose serupa, Si Ibu memberikan nasihat kepada anaknya: "kamu belajar yang rajin, supaya ketika besar dan sukses nanti, kami bisa membantu mereka yang kurang beruntung seperti pemulung itu".

Apa yang berbeda dengan kedua nasihat itu? Pada gambar pertama, Si Ibu fokus kepada kesuksesan anaknya

saja, sedang yang kedua, Si Ibu sudah memikirkan dampak sosial dari keberhasilan anaknya.

Coba kita renungkan: jika kita berada dalam posisi Si Ibu, nasihat mana yang akan kita pilih?

Memahami ketimpangan

Saya berharap banyak dari kita yang memilih perspektif kedua. Keberadaan kita diharapkan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Inilah ajaran Islam yang menegaskan bahwa sebaik-baik kita adalah yang memberikan paling banyak manfaat kepada orang lain.

Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ilustrasi sederhana di atas.

Pertama, ketimpangan masih menjadi masalah sosial yang dihadapi dunia saat ini. Tak terkecuali dalam keseharian di Indonesia. Indikasinya beragam. Pendapatan masyarakat Indonesia masih timpang. Salah satunya diindikasikan oleh rasio Gini 38,8% pada Maret 2023 (BPS, 2023a). Data di bulan yang sama, porsi masyarakat miskin masih cukup besar, yaitu 9,36% atau setara dengan 25,90 juta orang. Bahkan di Papua, proporsi pendudukan yang miskin mencapai 26,03% (BPS, 2023b).

Ketimpangan dan kemiskinan membawa banyak akibat. Akses ke banyak layanan, termasuk pendidikan, juga terbatas. Misalnya, menurut data Susenas 2023, pemuda usia kuliah yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi hanya 31,19%. Artinya, ada 68,81% atau sekitar lebih dari 17 juta pemuda tidak pernah mengenyam bangku kuliah.

Kedua, kesadaran bahwa yang mempunyai kuasa untuk melandaikan lapangan permainan (*leveling the playing field*) adalah mereka yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Untuk isu ini, kita bisa ibaratkan ketimpangan merupakan seperti ayunan jungkat jungkit dengan dua orang pemain, satu di setiap sisi. Orang yang bisa menjadikan papan ayunan semakin landai adalah pemain pada posisi tinggi. Dengan berat badannya, dia bisa mengangkat pemain satunya.

Metafora ini tampaknya valid untuk konteks kesuksesan seseorang, seperti nasihat Si Ibu pada ilustrasi pembuka. Kesuksesan seseorang akan menjadikannya mempunyai kuasa atau keleluasaan, termasuk dalam membantu orang lain. Bantuan bisa mewujud dalam banyak bentuk, termasuk kebijakan negara atau lembaga, gerakan sosial, maupun aksi individual.

Menumbuhkan empati

Karenanya, saya mengajak semuanya terus mengasah empati atau kepedulian kepada orang lain dan, di saat yang sama, mengelola sikap yang hanya peduli kepada diri sendiri. Hanya dengan demikian, dunia yang timpang akan menjadi lebih landai karena mereka yang berada di papan jungkat jungkit atas mau membantu yang tidak beruntung untuk meningkat derajatnya.

Sialnya, menurut survei McKinsey (Dondi et al., 2021) terhadap 18.000 orang di 15 negara, ternyata tingkat pendidikan hanya mempunyai korelasi rendah dengan empati seseorang. Tentu, ini memunculkan pertanyaan, bagaimana menumbuhkan empati?

Saya akan menyisakan pertanyaan ini untuk dijawab oleh semua hadirin, dan terutama oleh para wisudawan. Jawaban atas pertanyaan ini dan implementasinya akan membantu mengurangi ketimpangan dan membuat lapangan permainan lebih landai. Ini juga yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Sambutan pada Wisuda Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma
Universitas Islam Indonesia, 27-28 Januari 2024.*

11. Robohnya Kampus Kami

Obrolan khayali dengan seorang kawan terpelajar tentang kegelisahan panjang yang belum menemukan jawaban.

Langit masih berhiasan semburat merah awan selepas Magrib. Saya pun sampai di sebuah kedai kopi. Suasana masih lengang, karena ukurannya yang lumayan besar. Cacah tamu yang datang pun belum banyak. Sebagian orang mungkin masih meneruskan wirid atau menunda makan malamnya.

Tubuh saya arahkan ke salah satu kursi kosong. Saya sampaikan jika menunggu seorang kawan, ketika pelayan menghampiri.

Tak selang lama, kawan saya pun datang. Seperti biasanya, dia mendekat dengan langkah tegap dan senyum merekah. Topi laken fedora setia menutup kepalanya.

Kami pun mencari kursi yang lebih nyaman. Agak di dalam. Setelah memesan minuman tradisional, kami pun berbincang.

"Mas, gelisah *gak*, dengan kondisi bangsa saat ini," tanya kawan tersebut membuka pembicaraan. Kami cukup dekat meski mengabdikan di kampus yang berbeda.

"Jelas sekali, Mas", jawab saya.

Obrolan pun mengalir menyangkut banyak hal. Kami berdua berbagi kegalauan soal melempemnya kaum terpelajar bangsa ini. Tentu, kami pun merasa bagian dari mereka. Jika pun dianggap tidak benar, paling tidak, nurani kami mengirim sinyal seperti itu. Ada perasaan bersalah yang menghantui.

Kegelisahannya ini sudah lebih dari cukup untuk memproduksi asam lambung dan mengganggu ritme tidur. Sialnya, keberanian yang ditunggu juga tidak kunjung datang. Tulisan ini harus pun menunggu beberapa hari, sebelum saya putuskan untuk dirampungkan.

Kala itu, kami berbagi perspektif dan cerita, tentang apa yang mungkin dilakukan. Kami sadar dengan beragam kekangan dan risiko yang menghadang. Bukan hanya soal personal, tetapi juga gerbong institusi.

Banyak kawan-kawan yang kami harapkan ternyata sudah terkooptasi dan terbeli. Saya pun tersentak seakan tak terpercaya, sebelum akal sehat saya kembali menyapa. Semuanya ternyata masuk akal dari kacamata pragmatisme.

Meski demikian, kami sepakat untuk menjaga optimisme. Kami yakin, di luar sana, masih ada kawan-kawan yang mempunyai kepedulian serupa. Tulisan ini juga bentuk sapaan terhadap mereka.

Kampus kuburan

Obrolan di kedai itu mengingatkan saya kepada cerita seorang dosen senior yang sangat saya hormati. Dalam sebuah kesempatan, Prof Zaini Dahlan, Rektor Universitas

Islam Indonesia 1994-2002, gelisah dan berkata, "Kampus kita *kok* sepi sekali ya, *kayak* kuburan".

Komentar tersebut tidak mengarah kepada sepi fisik, tetapi sepi suara intelektual. Kampus di sini pun tidak merujuk kepada bangunan fisik semata, tetapi keseluruhan ekosistem pembentuk perguruan tinggi.

Karenanya, saya sangat senang, jika sebagian dosen masih menyempatkan menulis di kanal media publik untuk merespons berbagai masalah bangsa. Kadang secara personal, gagasan disampaikan. Di lain waktu, pusat studi menyampaikannya secara kolektif.

Ini adalah ikhtiar penting untuk menjaga sukma intelektual tetap hidup. Meski saya yakin, tidak semua orang, termasuk kalangan terpelajar, menganggap budaya menyampaikan pemikiran kritis ini masih penting. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan penghargaan koin dan poin dalam karier akademik dosen.

Yang jelas, tidaklah berlebihan jika kita menyimpulkan jika suara intelektual kampus sudah sangat jarang terdengar di ruang publik untuk merespons beragam isu dalam berbangsa dan bernegara. Padahal, pekerjaan rumah bangsa dan negara ini masih banyak.

Kita bisa sebut di antaranya, korupsi yang tak kunjung berkurang, kolusi dan nepotisme dalam semua bentuknya, penyalahgunaan kekuasaan yang melawan kepentingan publik, perusakan alam yang dibiarkan, sampai dengan beragam pengelabuan akal sehat publik.

Gelisah yang tersendat

Dalam diskusi terbatas, kegelisahan tersebut kadang muncul. Namun, kerongkongan para intelektual dapat tiba-tiba tersendat, ketika suara kritis hendak dikeluarkan. Ada beragam kemungkinan alasan.

Termasuk di antaranya adalah masalah labirin administratif yang menghantui para dosen dan pimpinan kampus. Tugas-tugas ini sudah menghabiskan banyak energi tanpa tambahan kualitas yang memadai. Meme Dr Strange bertangan banyak sebagai representasi dosen yang terjebak di semesta jamak dengan tugas berjibun, menggambarkan realitas ini.

Persaingan yang tidak sehat antarkampus untuk menempati peringkat, tak jarang telah menyita energi. Pemeringkatan yang merupakan anak kandung neoliberalisme ini tanpa disadari dapat menjauhkan kampus dari orientasi misinya. Tak jarang, untuk mencapainya beragam muslihat dilakukan dengan mengabaikan koridor moral.

Selain itu, menyampaikan gagasan di ruang publik pun bukan tanpa risiko. Saya masih simpan jawaban Prof. Azyumardi Azra ketika kami mendiskusikan soal ini melalui WhatsApp, sekitar sebulan sebelum beliau wafat. Beliau pun sadar risiko bersuara kritis.

Prof. Azra membalas pesan saya: "Saya juga kadang-kadang khawatir karena sering mengkritik secara terbuka di media elektronik dan media cetak. Saya tawakkaltu (alallah) sajalah. ... Bahkan yang terhitung kawan kita dalam barisan

kepemimpinan nasional ikut-ikutan menyalahkan mereka yang kritis."

Beragam definisi intelektual dapat ditemukan dalam literatur. Secara sederhana, intelektual adalah mereka yang selain mumpuni secara keilmuan, juga tetap menjaga sensitivitasnya untuk mengendus masalah publik dan meresponsnya.

Intelektual tidak boleh menjauh dari urusan publik. Ketika berhubungan dengan publik, tugas intelektual menurut Chomsky (2017) dalam bukunya berjudul *The Responsibility of Intellectuals*, adalah menyampaikan kebenaran dan membongkar kebohongan; memberikan konteks kesejarahan; dan mengungkap tabir ideologi dari beragam gagasan yang mengekang debat. Karena para intelektual mempunyai banyak privilese yang dinikmati, maka tanggung jawabnya pun lebih besar dibandingkan kalangan awam kebanyakan.

Saya dan Prof. Azra pernah berdiskusi ringan soal isu kebebasan berpendapat warga, terutama di kalangan intelektual. Pemicunya adalah teror yang diterima salah satu kolega saya, Prof. Ni'matul Huda, ketika akan menjadi pembicara sebuah seminar.

Saya masih ingat, saat itu mengutip pendapat Acemoglu dan Robinson (2019) dalam bukunya *The Narrow Corridor*: "Kebebasan akan muncul dan berkembang jika negara dan warga kuat. Negara yang kuat diperlukan untuk mengendalikan kekerasan, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik yang memberdayakan. Di sisi lain, warga yang kuat dibutuhkan untuk mengontrol dan

mengekan negara. Intelektualisme yang tumbuh di kalangan warga, terutama kaum terpelajarnya, adalah salah satu upaya menguatkan warga."

Kita semua tahu, saat ini, tidak semua media kalis dari kooptasi dan tidak semua kelompok masyarakat sipil steril dari intervensi. Namun, ketika intelektualisme di kalangan terpelajar juga memudar, tanpa bermaksud jemawa, gantungan harapan publik akan semakin sirna.

Kita pun menjadi saksi, secara perlahan bangunan intelektualisme tergerogoti beragam sebab dan dalih. Pilar-pilarnya pun menjadi keropos. Tanpa kemunculan kesadaran kolektif kaum intelektual, kampus dalam imajinasi moral pun menunggu waktu untuk roboh.

Semoga tidak!

*Tulisan sudah tayang di Republika pada 13 November 2023,
dengan beberapa penyesuaian.*

12. Indonesia Sonder Perguruan Tinggi Swasta

Dalam jagat pendidikan tinggi Indonesia, perguruan tinggi swasta (PTS) tak jarang dianggap sebagai warga kelas dua atau bahkan beban negara. Memang sikap ini tidak secara eksplisit disampaikan, tetapi tidak sulit untuk menemukan indikasinya. Diskusi panjang di antara pimpinan PTS soal ini menyimpan banyak cerita pahit.

Beban meringan

Mari berandai-andai. Jika ada orang di dekat pembaca, minta bantuannya untuk membaca bagian di bawah ini. Anggukkan kepala tanda setuju di setiap bagiannya.

Apa yang terjadi jika semua PTS di Indonesia dibekukan? Beban negara dipastikan menjadi lebih ringan. Energinya tidak lagi tersita untuk melayani 2.982 PTS. Apalagi sebagian PTS ini sering dikeluhkan tidak bermutu.

Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) pun bisa ditutup. Tidak perlu lagi menggaji ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di belasan LLDikti yang tersebar di seluruh Indonesia.

Anggaran negara pun tidak lagi tersedot untuk membayar tunjangan profesi 183.713 dosen PTS. Negara tidak perlu direpotkan lagi menyiapkan tempat penyimpanan data transaksi akademik 4.495.453 mahasiswa PTS. Beban layanan teknologi informasinya menjadi lebih ringan.

Negara pun tidak perlu menyiapkan anggaran besar untuk sektor pendidikan. Pada 2024, anggaran sektor pendidikan sekitar Rp665 triliun yang setara dengan 20 persen APBN. Jika melihat pola sebelumnya, sekitar satu persen diperuntukkan untuk pendidikan tinggi. Penghematan sebagian anggaran ini membawa kabar bahagia di tengah kesulitan negara membiayai beragam proyek strategis nasional. Ini baru soal yang terukur.

Kebahagiaan pun bertambah, ribuan ASN, termasuk para pejabat, yang selama ini melayani beragam persoalan PTS pun terlepas dari beban beratnya. PTS sering kali dianggap tidak tahu diri, karena terlalu banyak permintaan dan terlalu sering melakukan protes. Sebagian pejabat seakan sudah jengah dengan ulah PTS ini.

Ilustrasi di atas baru didasarkan pada PTS yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan. PTS yang berada di bawah Kementerian Agama belum masuk radar. Jika ini dimasukkan, hanya kebahagiaan yang membunyah, karena beban di pundak negara menjadi semakin ringan. Tentu, ini perlu dirayakan dengan suka cita. Hore!

Jika pembaca menyambut baik kabar gembira di atas, mari kita lanjutkan ceritanya. Anak muda usia kuliah

mempunyai waktu banyak bersama keluarga atau mencari nafkah, karena dari cacah mereka yang lebih dari 25 juta, hanya 3.379.828 atau 13,37 persen yang menjadi mahasiswa. Inilah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (APK PT) di Indonesia, jika semua PTS dilenyapkan dari muka bumi Indonesia.

Potret yang dicari

Pertanyaannya, apakah potret ini yang kita cari? Tentu saja tidak. Kita tidak ingin semakin penduduk usia kuliah yang tidak mendapatkan haknya, karena negara abai terhadap amanah konstitusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak rela, bangsa Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Kualitas anak bangsa harus terus ditingkatkan.

Dengan memasukkan kembali PTS dalam jagat pendidikan tinggi Indonesia, APK PT menjadi 31,16 persen. PTS berandil sebesar 17,79 persen, lebih tinggi dibandingkan andil PTN.

Karena beragam alasan itulah, PTS lahir di Bumi Pertiwi. Bahkan sebagian PTS lahir sebelum negara Indonesia resmi diproklamasikan. Universitas Islam Indonesia (UII), misalnya, lahir 40 hari sebelum kemerdekaan. Sebagian PTS lain, dibuka ketika bangsa ini dalam situasi sulit. Mereka sudah memikirkan masa depan bangsa. Ini adalah wujud kecintaan PTS yang mendampingi negara ketika tangannya tak sanggup memeluk semua anak bangsa. Sejak lama dilakukan dan masih sama, sampai hari ini.

Jika kesadaran ini yang hadir, maka posisi PTS akan dimuliakan, keberadaannya dianggap mitra, kehadirannya disambut dengan suka cita, dan pertumbuhannya diupayakan bersama. Bukan sebaliknya: posisinya dihinakan dengan selalu diragukan kualitasnya, keberadaan dianggap pesaing, kehadirannya disamakan dengan beban, dan pertumbuhannya diabaikan karena tidak punya masa depan.

Ingat, sebagian besar PTS yang dianggap mapan, juga dimulai dari PTS kecil yang terseok-seok di awal berdirinya. Dengan konsistensi pada nilai pijakan yang mulia dan ikhtiar kolektif istikamah, perlahan PTS bertumbuh dan menegaskan kontribusinya untuk bangsa. Hanya segelintir PTS yang lahir bongSOR. Karenanya, tidak perlu lagi menghinakan PTS yang sedang berjuang untuk berkembang.

Peran penyanding

Apakah pembaca masih belum yakin tentang dampak signifikan kehadiran PTS? Tidak apa-apa. Jangankan pembaca awam, sebagian pejabat, termasuk yang di PTN, yang digaji dengan uang pajak pun terkadang demikian. Seakan mereka ingin mengaburkan peran PTS dengan mengatakan: "Betul, jumlah PTS ribuan tapi hanya melayani 4,5 juta mahasiswa loh. PTN meski jumlahnya hanya 125, tapi melayani 3,3 juta."

Kehadiran PTS seakan dianggap tidak berharga, karena kalah dengan PTN yang dianggap selalu hebat. Posisi yang membandingkan dan bukan menyandingkan ini sangat berbahaya. Sialnya, hal ini tidak disadari. Terus terang, saya juga sangat khawatir jika sudut pandang yang muncul dari

alam bawah sadar ini diadopsi oleh pejabat pengambil kebijakan.

Mungkin karena pemahaman ini juga, ada modul khusus bersampul sebuah apel merah di atas tumpukan buku, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berjudul: Modul Penggalan Potensi Pajak Sektor Usaha Jasa Pendidikan. Namun, ini baru dugaan, dan karenanya perlu ditabayun, supaya tidak menimbulkan fitnah.

Mari kita lanjutkan dengan beberapa data. Dari 34 provinsi yang terdaftar dari data BPS, di 21 provinsi, proporsi mahasiswa yang menuntut ilmu di PTS lebih dari separuh. Di Sumatera Utara, misalnya, dari 381.458 mahasiswa, 78,3 persen berkuliah di PTS. Di Riau, sebanyak 73,0 persen mahasiswa duduk di bangku PTS. Bahkan di DKI Jakarta, angka ini mencapai 85,1 persen. Potret ini belum ditambah dengan fakta sebaran PTS yang menjangkau pelosok negeri yang tidak terjangkau oleh tangan negara.

Kaca mata jernih

Negara sudah seharusnya melihat PTS dengan kaca mata yang lebih jernih. Betul, ada disparitas kualitas PTS. Fenomena serupa pun terjadi di PTN, meski dengan kesenjangan yang berbeda. Itulah pekerjaan rumah bersama bangsa ini.

PTS tidak pernah ingin menjadi anak emas dan diperlakukan istimewa. Yang dibutuhkan hanya lapangan permainan setara yang menjadi lahan subur untuk pertumbuhan bersama. PTS sudah bertahun-tahun

membuktikan dirinya mampu mandiri, tanpa terlalu banyak uluran tangan pemerintah.

PTS pun tidak lantas menjadi anak durhaka yang lupa berterima kasih kepada negara dengan beragam program ungkitan. Apresiasi tinggi tentu diberikan. Namun, jeritan PTS yang menggaung di ruang publik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan penerimaan mahasiswa baru, perlu didengar kembali dengan kesadaran baru dan dilihat lagi dengan lensa yang lebih sensitif.

Bisa jadi, tidak semua usulan mungkin diakomodasi, karena beragam alasan. Tetapi, saya yakin banyak ruang terbuka untuk perbaikan bersama. Itulah indahnya argumentasi di dunia akademik ketika semuanya mungkin dibicarakan dengan terbuka tanpa kepentingan tersembunyi dan kalis dari adu kuasa. Semoga.

Tulisan sudah tayang di [Republika.id](https://www.republika.id) pada 3 Desember 2023.

13. Hukum yang Manusiawi

Atas nama UII, saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku berjudul *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia* yang diluncurkan dan didiskusikan hari ini. Saya juga ingin mengajak semua hadirin untuk memberikan apresiasi yang tinggi kepada ikhtiar kolektif ini, yang melibatkan penulis lintas lembaga dan dengan dukungan penuh dari The Norwegian Center for Human Rights (NCHR) atau *Norsksenter for Menneskerettigheter*, Universitas Oslo.

Kita semua berharap, kehadiran buku langka ini akan menjadi referensi bermakna untuk pembaruan hukum di tanah air, terutama terkait inklusi hukum hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hukum kontekstual

Saya harus melakukan pengakuan di depan. Latar belakang saya sama sekali tidak terkait dengan hukum.

Saya diberi buku yang akan diluncurkan beberapa waktu lalu. Tentu, saya menyambutnya dengan antusias dan memulai membacanya. Paling tidak sebagian isi buku. Bagian epilog yang ditulis oleh Bapak Andriaan Bedner pun saya baca. Meski tidak dapat mencerna semua poin, saya

sebagai orang awam hukum, menangkap banyak poin penting.

Saya pun akhirnya teringat kisah Nenek Minah yang terjadi 14 tahun lalu, pada 2009.

Nenek Minah, pada saat itu, selepas memanen kedelai di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA), Purwokerto. Dalam perjalanan pulang melihat kakao matang di perkebunan tempat ia bekerja, dan dia ingin memetikanya. Tiga buah kakao dipetikanya dan diletakkan di bawah pohon.

Dia ingin mengambil biji kakao untuk disemai di kebunnya sendiri. Mandor perkebunan memergokinya. Nenek Minah langsung meminta maaf dan menyerahkan ketiga kakao tadi.

Sekitar seminggu kemudian, Nenek Minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian. Proses hukum pun bergulir.

Akhirnya Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao seberat 3 kg seharga Rp6.000, meski dia tak perlu menjalani hukuman itu, dengan catatan tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tiga bulan.

Tentu, di luar kapasitas saya untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Namun, hati nurani saya melihat ada yang "aneh" dalam kasus tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan kasus-kasus besar lain, seperti korupsi.

Sekilas saya lacak latar belakang Nenek Minah. Dia miskin. Untuk ongkos perjalanan menghadiri sidang dengan biaya ojek dan angkutan umum Rp50.000 juga sangat berat.

Banyak pertanyaan yang muncul di benak saya: Apakah itu yang dinamakan keadilan? Apakah hukum memang harus saklek atau kaku tanpa melihat konteks? Ataukah ada perspektif lain?

Tirani meritokrasi

Pekan lalu, oleh seorang kawan, saya diberi hadiah sebuah buku, berjudul *The Tyranny of Merit* (Sandel, 2020). Penulisnya Michael J. Sandel, profesor di Harvard Law School.

Pesan besar yang diusung oleh buku ini adalah, bahwa ketika kesenjangan atau ketimpangan masih ada dan apalagi tajam, prinsip meritokrasi hanya akan mendemoralisasi atau melemahkan semangat mereka yang tertinggal.

Dalam tafsiran sederhana saya, jika hak-hak dasar manusia atau warga negara belum bisa terpenuhi maka lapangan permainan tidak akan menjadi landai. Akibatnya, dapat dipastikan jika ada kompetisi atau tuntutan untuk patuh kepada standar tertentu, ada pihak yang merasa diuntungkan. Inklusivitas dan keadilan kemudian dipertanyakan.

Apakah mungkin ini juga berlaku dalam hukum? Saya dengar jika dalam hukum juga ada politik. Pembentukan hukum sebagai "standar" bersama, juga katanya tidak selalu kalis dari kepentingan. Ada potensi hak-hak dasar manusia diabaikan.

Jika ini benar, maka paling tidak sebagian hukum positif yang berlaku mengandung ruh ketimpangan. Apakah

mungkin meritokrasi dalam konteks kesetaraan di depan hukum masih valid?

Saya tidak akan masuk lebih dalam, karena di luar kapasitas saya. Saya menyerahkan kepada ahlinya untuk mendiskusikannya.

Epilog

Sebelum mengakhiri sambutan. Izinkan saya, atas nama UII, khususnya Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PusHAM) UII, dalam kesempatan baik ini menyampaikan terima kasih kepada Direktur The Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo University, Norway, diwakili oleh Aksel Tømte.

NCHR sudah memberi dukungan yang luar biasa kepada PusHAM UII sejak 2006 sampai saat ini, dan hanya mengalami hiatus selama dua tahun pada 2017-2018. Selama periode kerja sama tersebut, NCHR sudah mengucurkan dana sekitar Rp36 miliar untuk beragam program bersama.

Sampai saat ini, lebih dari 350 dosen dari seluruh Indonesia telah menjadi alumni pelatihan Hukum HAM yang diselenggarakan oleh PusHAM UII. Buku yang diluncurkan secara terbuka hari ini adalah yang ke-9 dengan dukungan penuh dari NCHR.

UII juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan ruang sangat besar kepada PusHAM UII untuk belajar dan berkontribusi melalui Badan Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung. Insyaallah, kontribusi tersebut terus

menempa dan memantapkan posisi PusHAM UII sebagai bagian institusi pembaru hukum di Indonesia.

Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua narasumber, penulis buku, pembahas, dan hadirin sekalian. Selamat berdiskusi.

*Sambutan pada peluncuran buku Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia:
Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia,
12 Desember 2023.*

14. Mempertanyakan Kemapanan

Kecakapan dan pengalaman yang sudah Saudara kumpulkan selama studi, insyaallah sudah cukup untuk membuka beragam pintu berkiprah. Pilihannya beragam, mulai bekerja di perusahaan atau lembaga yang sudah ada, membuka usaha, atau melanjutkan perjalanan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Apa pun pilihan Saudara, setiapnya mempunyai tantangannya masing-masing. Namun ada satu tantangan yang sama, yaitu bahwa apa yang sudah Saudara kuasai saat ini, sangat mungkin jadi menjadi kedaluwarsa di masa mendatang. Karenanya, Saudara harus terus mengasah diri. Selalu pastikan keberadaan Saudara relevan untuk konteks waktu dan tempat berkarya. Hanya dengan demikian, kontribusi terbaik dapat diberikan.

Ilmu pengetahuan yang terus berkembang tak jarang menawarkan banyak perspektif baru. Sebagai mengganti yang lama, sisanya melengkapinya. Keterbukaan dan penguasaan beragam perspektif ini menjadi penting di masa yang berubah sangat cepat untuk menjadikan Saudara semakin adaptif.

Di kesempatan yang singkat ini, mari kita ungkap beberapa perspektif yang mungkin belum masuk radar.

Perspektif lama bisa jadi sudah kedaluwarsa atau perlu dilengkapi dengan yang baru. Perspektif baru ini hadir karena selalu mempertanyakan kemapanan, sesuatu yang sudah sering dianggap final.

Mari kita diskusikan dengan ringkas dan awali dengan pertanyaan.

Tidak harus rapi

Pertanyaan pertama: apakah segala sesuatu harus teratur dan rapi? Pemahaman tradisional akan menjawab: "ya". Tetapi, studi mutakhir memberikan jawaban lain. Ada manfaat tersembunyi dari kondisi yang berantakan atau kesemrawutan sampai tingkat tertentu.

Banyak tindakan paradoks yang menjadikan kita tidak produktif. Pernah membayangkan seorang gadis yang akan keluar jalan-jalan dengan tampilan kasual harus menghabiskan waktu satu jam di depan cermin? Atau, orang tua yang setiap kali sibuk membereskan mainan anaknya yang terserak, tetapi tidak pernah bisa meluangkan waktu bermain dengan anaknya. Atau, apa yang terjadi jika seorang pustakawan datang ke rumah dan membantu Saudara mengatur kembali buku-buku dalam perpustakaan pribadi yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan? Saya jamin, Saudara akan kesulitan mencari kembali buku, dibandingkan jika dalam posisi semula yang telah Saudara hafal.

Apa pesan moralnya? Ternyata, untuk menjadi yang terbaik atau optimum, tidak semuanya harus teratur, tertata rapi. Namun, dalam tingkatan tertentu ketidakteraturan atau kesemrawutan harus ditoleransi atau bahkan dibuat.

Tentu, ini bukan alasan untuk menjadikan segala sesuatunya berantakan. Tetapi, ini adalah lensa yang dapat kita gunakan untuk menoleransi kesemrawutan ketika biaya yang dikeluarkan untuk merapikannya tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan atau risiko yang dapat dimitigasi.

Jika tertarik mendalami topik ini, Saudara dapat membaca buku berjudul *A Perfect Mess: The Hidden Benefits of Disorder* karya Abrahamson dan Freedman (2013).

Jangan remehkan yang kecil

Pertanyaan kedua: apakah yang kecil bisa mengalahkan yang besar? Banyak dari kita mungkin mengatakan: "ya, tetapi sulit". Studi mutakhir menemukan bahwa yang kecil dapat mengalahkan yang besar dalam banyak konteks yang pas. Kecil di sini merangkum beragam kondisi termasuk tidak diunggulkan dan tidak cocok.

Banyak kisah bisa diberikan di sini: tim yang tidak diunggulkan mengalahkan juara bertahan, pelari dengan tubuh kecil mengungguli pelari dengan kaki yang lebih jangkung, orang dengan prestasi akademik yang tidak terlalu menonjol dapat menjadi pemimpin di perusahaan besar, atau orang yang tidak lulus kuliah berhasil menjadi orang sukses. Dapat dipastikan di belakang setiap peristiwa itu terdapat cerita yang luar biasa, terkait dengan tekad, usaha tak lelah, dan kecakapan tinggi.

Sebagai orang beriman, kita menambahkan dalam daftar ini: izin Allah. Tetapi, kita harus ingat, bahwa Allah itu Maha Adil dan di setiap kejadian ada sunatullah yang bisa

menjelaskan. Pemalas tidak akan sukses, misalnya, adalah merupakan sunatullah.

Kisah yang kecil mengalahkan yang besar ibarat Daud melawan Jalut (atau David melawan Goliath). Kisah ini bukan mitologi tetapi terdokumentasikan dalam Kitab Suci. Bagaimana Daud yang berperawakan kecil dapat mengalahkan Jalut? Apa sunatullah yang berada di baliknya?

Pada pertarungan satu lawan satu tersebut Daud menggunakan katapel dan bahkan tanpa mengenakan baju zirah untuk perang. Di sisi lain, Jalut menggunakan baju zirah dan senjata lengkap. Jalut yang berperawakan besar ternyata mengidap penyakit akromegali yang diikuti dengan padangan yang kabur. Karenanya pertarungan harus dilaksanakan pada jarak dekat.

Inilah yang dimanfaatkan oleh Daud dengan cerdas. Simulasi laboratorium menunjukkan bahwa batu yang dilontarkan dengan kecepatan 45 meter per detik sanggup untuk melubangi tulang tengkorak. Batu inilah yang mengenai dahi Jalut karena tidak tertutup baju zirah. Penelitian mutakhir juga menemukan bahwa batu dari tempat pertempuran, Lembah Elah, mempunyai karakteristik khusus yang lebih keras.

Tertarik dengan kisah ini dan pelajaran yang bisa diambil? Saudara dapat membaca buku berjudul *David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants* karya Malcolm Gladwell (2013).

Perubahan tanpa drama

Pertanyaan ketiga: apakah perubahan harus dilakukan dengan kebijakan besar? Mari kita simak fakta berikut. Setiap hari, kita membuat 200 keputusan terkait dengan makanan. Sebagian keputusan dilakukan dengan sengaja dan hati-hati, tetapi sebagian besar ditentukan dengan kesadaran pendek, otomatis, dan melihat kepraktisan.

Faktanya, 45% perilaku harian kita di luar kebiasaan, dan cenderung diulang dalam konteks yang serupa. Kebiasaan adalah jalan pintas yang tidak menjamin pengambilan keputusan terbaik, tetapi cukup untuk merespons dengan cepat, terlepas itu menjadi kebiasaan baik atau buruk. Namun, pilihan-pilihan cepat ini mempunyai konsekuensi dan mempengaruhi keputusan lanjutan yang diulang dari waktu ke waktu.

Apa contohnya? Penempatan makanan di kantin sekolah atau pabrik, bisa mengubah pola makan menjadi lebih sehat, ketika makanan yang sehat tidak terlihat mata dengan mudah. Potensi ketidakpuasan konsumen karena antre dapat diminimalkan dengan memasang monitor dengan tontonan yang menarik.

Perubahan kecil atau gocekan (*nudge*) karenanya dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Gocekan tidak memerlukan pembuatan peraturan atau pemaksaan, dan karenanya terjadi tanpa drama.

Tertarik kajian lebih mendalam? Sila cari buku berjudul *Nudge* karya Thaler dan Sunstein (2009).

Tampaknya, jawaban atas beberapa pertanyaan sudah cukup untuk sambutan kali ini. Tentu, ini hanya contoh

bahwa perspektif dapat berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pertanyaan lain

Masih banyak pertanyaan lain yang bisa menjadi bahan refleksi masing-masing kita. Kita bisa sebutkan beberapa di antaranya: (a) Apakah manusia selalu rasional?; (b) Apakah untuk menilai kualitas seseorang atau sesuatu harus dilakukan dengan masa yang lama?; (c) Apakah orang pendiam yang introvert tidak dapat menjadi pemimpin sukses?.

Kita juga bisa menanyakan: (d) Apakah humor merupakan praktik yang tidak serius?; atau (d) Apakah ide yang dihasilkan banyak kepala lebih baik dari satu kepala?; atau (e) Apakah perencanaan harus dilakukan dengan detail dan kejadian yang tidak direncanakan selalu buruk?

Tentu daftar pertanyaan ini masih dapat diperpanjang. Kita bisa bahas jawaban pertanyaan ini dalam kesempatan yang lain, termasuk ketika Saudara diwisuda lagi di sini untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jika Saudara penasaran, sebagian jawaban pertanyaan di atas dapat ditemukan dalam buku berjudul (a) *Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decision* karya Dan Ariely (2009); (b) *Blink: The Power of Thinking without Thinking* karya Malcolm Gladwell (2006); (c) *Quiet: The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking* karya Susan Cain (2012);

Jawaban lain dapat juga ditemukan pada buku: (d) *The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few* karya

James Surowiecki (2009); dan (e) *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable* karya Nassim Nicholas Taleb (2007).

Teruslah pertanyakan banyak hal, tantang asumsi yang sudah mapan, dan cari jawaban ilmiah.

Sambutan acara wisuda Universitas Islam Indonesia pada 9 Maret 2024.

15. Membaca Kegelisahan

Ketika kami berdua mendiskusikan soal budaya membaca, seorang sahabat bertanya secara retorik kepada saya, "Apakah kawan-kawan tidak punya kegelisahan, ya?". Timpal saya dengan setengah bercanda, "Mungkin kawan-kawan kita sudah mempunyai jawaban untuk banyak hal." Sahabat ini merespons sambil tersenyum, "*Tenane?*". Jangan-jangan kami berdua yang salah membaca keadaan.

Obrolan ringan kami pun berlanjut. Tidak selalu mendiskusikan hal penting menurut banyak orang. Kami berdua mempunyai kebiasaan saling menghadiahkan buku. Oleh-oleh perjalanan tidak dalam bentuk kudapan, tetapi asupan untuk menjawab beragam kegelisahan.

Komitmen membaca

Ketika membuat tulisan ini, saya teringat seorang kawan ketika kuliah dulu, sekitar 30 tahun yang lalu. Dia merasa berdosa ketika tidak mengalokasikan waktu membaca setiap hari. Ucapan itu dibuktikannya. Saya terinspirasi, meski belum bisa segalak itu.

Akhirnya, sebuah ritual kecil kami buat. Setiap pekan mendiskusikan satu buku, yang dipresentasikan oleh kawan-kawan secara bergantian. Ritual kecil menjadikan setiap

pesertanya seakan membaca sebuah setiap pekannya. Kegiatan tersebut kami jalankan di sebuah masjid di Jl. Sancang, Bandung. Alhamdulillah ikhtiar tersebut berjalan beberapa kali, meski akhirnya harus gulung tikar juga.

Membudayakan membaca ternyata memang berat. Dalam konteks Indonesia, tidak terkecuali. Sebagian orang berdalih, karena budaya kita adalah budaya lisan. Bisa jadi ada benarnya. Tetapi untuk dunia akademik, bagaimana budaya lisan bisa membantu penyebaran ilmu pengetahuan dengan efektif?

Tanpa berpikir panjang, sebagian orang mungkin langsung menukas, "Itu, tradisi di pondok pesantren, para kiai menyampaikan ilmu dengan lisan". *Eit*, tunggu dulu! Para kiai yang menyampaikan banyak hal berat dengan kemasan sederhana itu, bermula dari bacaan yang dahsyat. Berikut ada beberapa ilustrasi.

Kiai saya di Kudus, Almarhum Mbah Yai Ma'ruf Irsyad ketika akan memberikan ceramah atau khotbah, biasanya membaca beberapa kitab di ruang tamu. Persiapan dilakukan dengan serius. Khotbahnya yang terdokumentasi dalam bentuk tulisan. Sebagiannya masih terlacak dan dirangkum menjadi bagian buku biografi Beliau, yang disiapkan oleh para santrinya.

Sewaktu sowan ke Gus Baha di Rembang, saya temukan anotasi di papan putih di ruang tamu dalam bahasa Arab. Saya tanyakan ke adiknya, Gus Fuad, "Siapa yang menulis?". Ternyata itu tulisan Gus Baha sendiri. Ketika kami berdiskusi, juga terungkap, ceramah Gus Baha yang terkesan sederhana itu, berasal dari perenungan yang

mendalam. Gus Baha sendiri yang menyampaikan ke saya. Semuanya itu tak mungkin tanpa belanja perspektif dengan membaca. Saya juga sempat diundang masuk ke perpustakaan pribadinya, yang terhubung dengan ruang tamu.

Perintah membaca

Jangan lupa, tradisi mengaji di pondok pesantren juga banyak didasarkan pada kitab klasik (*turats*) yang merupakan warisan tradisi menulis. Tradisi menulis tidak akan pernah terbentuk tanpa budaya membaca yang baik. Membaca dan menulis ibarat dua sisi koin yang sama.

Bagi seorang muslim, perintah membaca sudah sangat jelas. Bahkan wahyu pertama juga soal membaca.

Daftar manfaat dari membaca bisa kita buat dan sangat panjang. Di dalamnya ada mendapatkan pengetahuan baru, memperluas perspektif, menambah kosa-kata, meningkatkan nalar kritis, dan mengasah kemampuan menulis. Jika ingin ditambah, di sana ada memperbaiki daya ingat, menstimulasi imajinasi, dan juga mengurangi stres.

Tetapi apakah membaca, dengan keragaman tafsirnya, sudah menjadi tradisi di kalangan muslim? Kita bisa refleksikan masing-masing secara jernih dan jujur.

Semoga kita terus mempunyai kegelisahan untuk dijawab. Membaca adalah salah satu pintu mendapatkan jawaban tersebut.

Tulisan sudah tayang di UIINews edisi Agustus 2024.

16. Yogyakarta Masih (Ny)aman?

Apakah Yogyakarta masih aman dan nyaman? Seorang kawan pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) bercerita jika dia diminta membuat pernyataan oleh orang tua mahasiswa yang ingin mengirimkan anaknya berkuliah di Yogyakarta. Apa pasal? Orang tua yang berdomisili di Pulau Sumatera tersebut khawatir dengan keamanan anaknya ketika merantau.

Berita terkait kekerasan jalanan (klithih) yang kerap terjadi di Yogyakarta telah sampai ke pulau seberang. Saya pun mengetikkan frasa “kekerasan jalanan” Yogyakarta di mesin pencari Google. Muncul 33.800 entri. Ketika saya khususnya ke kanal berita, muncul lebih dari 5.000 entri.

Citra Yogyakarta

Paparan informasi soal kekerasan jalanan ini ternyata telah berandil mengubah citra Yogyakarta. Kawan saya tersebut percaya bahwa kekerasan jalanan yang tak kunjung mendapatkan solusi permanen ini mempunyai andil pada penurunan minat calon mahasiswa luar daerah untuk datang ke Yogyakarta. Saya mengamini kekhawatiran ini.

Masalahnya tidak hanya sampai di isu keamanan. Kawan tersebut juga bercerita jika orang tua di Pulau

Kalimantan mengeluhkan hal lain ketika mengirimkan anaknya untuk menuntut ilmu di PTS Yogyakarta. Ketika pulang, anaknya tidak menjadi semakin santun seperti yang diharapkan.

Padahal, di waktu yang lampau, budaya Yogyakarta dipercaya telah membentuk mahasiswa pendapat menjadi lebih santun, budaya yang sangat ‘jogjawi’. Orang tua ini pun akhirnya secara retorik bertanya: mengapa saya harus memilih Yogyakarta untuk sekolah anak saya, jika tidak berbeda dengan kota lain?

Cerita tentang kesan terhadap Yogyakarta yang berubah sudah cukup lama saya dengar. Beberapa tahun lalu, misalnya, seorang kawan pimpinan PTS di Jawa Timur menarik kembali anaknya yang bersekolah di Yogyakarta. Anaknya tersebut didekati oleh sebuah geng yang akan merekrutnya.

Namun, jika kampus sampai diminta membuat surat pernyataan tertulis itu kejadian yang tidak pernah saya bayangkan.

Sebagian pembaca mungkin langsung menolak dengan dalih: *kan* hanya beberapa orang tua saja. Alasan lain dibuat: sebagian besar Yogyakarta masih baik-baik saja. Tapi, bagaimana meyakinkan orang tua di pulau seberang sana? Bagaimana jawaban kita jika ternyata berita kekerasan jalanan terus menghiasi media.

Sebagai bentuk tanggung jawab, apakah mungkin kita anggap cerita di atas sebagai sistem peringatan dini yang perlu dimitigasi segera?

Jangan sampai kita menyepelekan isu terkait kesan tidak aman dan nyaman ini. Banyak keputusan orang tua calon mahasiswa yang didasarkan pada kesan yang dibentuk dari informasi yang memapar. Mereka pun mulai mempertanyakan, apakah Yogyakarta tetap berhati nyaman. Ini satu sisi.

Di sisi lain, pengabaian terhadap masalah (kecil) yang muncul, sangat mungkin akan menjadikan masalah membesar. Ingat Teori Jendela Rusak! Ketika jendela rusak di sebuah gedung dibiarkan, maka orang akan mengira bahwa gedung tidak dikelola dengan baik. Jangan kaget, jika di kemudian hari, semakin banyak kaca jendela lain yang pecah.

Langkah kolektif

Ini adalah isu serius. Apa yang bisa dilakukan secara kolektif? Ada beberapa.

Pertama, semua pihak terkait, termasuk sekolah, kampus, masyarakat, pemerintah, dan aparat saling bahu-membahu menjaga Yogyakarta tetap kondusif sebagai tempat tujuan belajar. Fakta sosial bahwa warga Yogyakarta selalu santun dan ramah kepada pendatang perlu terus dihadirkan. Ini sekaligus akan menjadi cermin bagi pendatang untuk mempelajari dan menyerap kebaikan budaya setempat.

Kedua, berita-berita baik terkait Yogyakarta perlu terus diproduksi dengan kegiatan positif dan dilempar ke media. Kemarahan atau protes kita kepada pemberitaan yang suka dengan sudut pandang negatif tidak akan banyak

berdampak. Kita harus banjir media dan dunia maya dengan berita baik.

Ketiga, oknum pelaku kekerasan jalanan harus diproses dengan tuntas dan kelompok geng inang tempat menularnya kekerasan perlu dikondisikan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memangkas budaya laten ini sampai ke akar-akarnya.

Tentu, masih banyak upaya lain yang bisa dipilih, tetapi waktu terus berjalan. Tanpa tindakan segera, predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dapat memudar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga tidak!

*Tulisan sudah ditayangkan pada Kolom Analisis Kedaulatan Rakyat
pada 30 Oktober 2023.*

17. Surat Cinta PTS Yogyakarta untuk Mas Menteri

Mas Menteri yang kami hormati,

Semoga Mas Menteri senantiasa dalam kesehatan paripurna. Kesehatan adalah modal awal untuk berkhidmat. Kehadiran Mas Menteri masih sangat dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan nasional. Tak terkecuali, pendidikan tinggi di Bumi Pertiwi.

Izinkan saya menjadi penyambung lidah kawan-kawan pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta. Cacahnya lebih dari 100. Saya salah satunya.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami selama ini telah berjuang untuk terus bertumbuh dan memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak negeri. Tidak hanya untuk warga setempat, tetapi juga pendatang dari pulau seberang dan bahkan mancanegara.

Sudah lama kami gelisah dengan perkembangan mutakhir pendidikan tinggi di Indonesia. Tentu, kami sangat mengapresiasi beragam kebijakan yang sudah Mas Menteri telurkan untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Sejak lahirnya ide cemerlang Kampus Merdeka, lanskap pendidikan tinggi telah berubah. Banyak sisi positif yang kami nikmati. Namun, sangat wajar, jika sebuah kebijakan

juga mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Ini tentu perlu dimitigasi.

PTN kini

Mas Menteri yang kami hormati,

Niat menjadikan banyak perguruan tinggi negeri (PTN) semakin dewasa dan mandiri, dengan menjadikan mereka PTN BH (Badan Hukum) adalah sangat mulia. Kami yakin, para PTN akan berlomba semakin inovatif, termasuk dalam mencari sumber pendanaan.

Proporsi dana pemerintah yang diterima oleh PTN BH semakin sedikit. Kabar yang sayup-sayup kami dengar, hanya sekitar 40% dari keseluruhan dana operasional. Sisanya, PTN boleh mendapatkan dana dari publik.

Bahkan, mampir ke telinga kami, sebuah kabar jika ada PTN yang menarik dana jika ada PTS yang ingin bekerja sama. Tentu, kabar seperti ini harus ditabayun, supaya tidak menjadi fitnah. Semoga ini hanya isapan jempol.

Kami juga tidak mudah percaya, jika kebijakan ini yang akhirnya menjadikan PTN menambah mahasiswa baru dalam jumlah yang luar biasa dan juga membuka program studi di luar khitahnya. Kami takut bersuuzan kepada PTN BH yang mendapatkan dukungan pemerintah, kekurangan dana sehingga mengembangkan ‘kapal keruk’ untuk menjaring mahasiswa tingkat diploma dan sarjana dengan cacah di luar nalar sehat.

Kami semua menginginkan negara yang kuat. Karenanya, kami sangat khawatir dianggap tidak percaya pada kemampuan anggaran negara. Kami tentu juga tidak

rela jika negara dianggap cuci tangan dari kewajibannya mencerdaskan anak bangsa. Kebijakan yang membuka pintu 50% mahasiswa baru dapat melalui jalur mandiri, kami yakin mempunyai alasan yang mulia.

Konon menurut sebuah kabar sebuah PTN meningkatkan mahasiswa sampai sekitar 100% dari tahun lalu. Jika pada 2022 hanya menerima sekitar 11.000 mahasiswa baru, tahun ini menerima lebih dari 22.000. Sekali lagi, semoga ini hanya kabar burung yang tidak benar.

Suara PTS

Mas Menteri yang kami hormati,

Tanpa bermaksud tidak sopan, melalui surat terbuka ini, izinkan kami menyampaikan hasil survei terhadap para pimpinan PTS di Yogyakarta. Tahun ini, banyak PTS yang harus memundurkan batas akhir penerimaan mahasiswa baru. Beberapa dari kami bahkan menundanya lebih dari 4 pekan dari rencana semula.

Ternyata, jadwal penerimaan mahasiswa baru di PTN, termasuk yang di bawah Kementerian Agama, telah mengubah konstelasi, karena ketidakpastian yang semakin tinggi. Melalui Aptisi V, mereka menitipkan pesan kepada Mas Menteri untuk meminta para pimpinan PTN yang terhormat menutup penerimaan mahasiswa barunya di akhir Juli. Kami sangat yakin, PTN sudah sangat kuat dan tidak akan kolaps karena permintaan sederhana ini.

Dengan semua kelebihan yang dimiliki, PTN pun bisa berfokus pada pendidikan tingkat magister atau doktor yang

masih membutuhkan perhatian lebih. Juga dengan akumulasi sumber daya, PTN bisa menjadi contoh bagi banyak PTS dalam mengembangkan riset yang berkelas dunia.

Karena itu, para pimpinan PTS di Yogyakarta, juga memohon Mas Menteri dapat membatasi proporsi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri. Sebanyak 36,6% pimpinan PTS bahkan tidak menginginkan jalur ini tetap dibuka. Sebagian besar lainnya (39,0%) setuju di angka 5%. Sebanyak sekitar 25%, memberikan sedikit kelonggaran antara 10% sampai dengan 20%.

Kami sangat yakin, Mas Menteri dengan pengalamannya mengelola perusahaan kelas dunia, sangat mudah memahami permintaan kawan-kawan saya ini. Permintaan ini tampaknya tidak hanya disuarakan dari pojok Yogyakarta, tetapi juga belahan lain negeri ini.

Memang betul, PTS yang jumlahnya ribuan itu ‘hanya’ melayani 4,5 juta mahasiswa, sedang PTN yang cacahnya ratusan itu menjadi rumah bagi sekitar 3,3 juta mahasiswa. Tetapi, ada yang sering dilupakan. Sebaran PTS menjangkau seluruh pelosok negeri, selain juga memberikan layanan pendidikan tinggi yang tidak mampu diberikan oleh PTN. Tidak hanya soal jangkauan geografis, tetapi juga perihal jangkauan daya beli.

Mas Menteri yang kami hormati,

Sekali lagi, saya mohon maaf jika surat terbuka ini membuat tidak nyaman. Insyaallah tidak ada niatan lain kami, selain untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia

yang bisa diakses oleh semakin banyak anak bangsa. Kami cinta bangsa dan negara ini. Kami yakin, kita semua mempunyai visi masa depan yang sama: Indonesia maju.

Kami selalu mendoakan, semoga Mas Menteri dan seluruh jajaran selalu dimudahkan Allah dalam menjalankan amanat mulia ini.

Mohon berkenan menerima salam takzim kami.

Tulisan ini sudah tayang di [Republika.id](https://republika.id) pada 31 Oktober 2023.

18. Kok TikTok Tok

Ahad pagi akhir pekan lalu, tiba-tiba, seorang jurnalis yang saya hormati mengirim pesan WhatsApp. Dia ingin mengklarifikasi konten TikTok oleh akun @suryaaae0 yang mengaku sebagai mahasiswa bimbingan skripsi Prof. Mahfud MD.

Konten video itu menunjukkan ruang kerja calon wakil presiden tersebut di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII). Narasi yang dibangun oleh pemilik akun adalah bahwa Prof. Mahfud menelantarkan bimbingannya.

Kebohongan itu

"Niat arep bimbingan lakok ditinggal dadi cawapres". Berniat akan melakukan bimbingan, tapi ditinggal menjadi calon wakil presiden. Demikian teks dalam video tersebut.

Konten TikTok itu disambar begitu saja oleh beberapa media, termasuk yang selama ini terlihat bonafide. Sejak Konten tersebut sudah ditonton 1,5 juta kali, disukai 95,7 ribu orang, mendapatkan lebih dari 1.500 komentar, dan dibagikan sebanyak 1.250 kali.

Tabayun pun saya lakukan. Prof. Mahfud sebagai pejabat negara sudah lama tidak membimbing skripsi mahasiswa tingkat sarjana. Dapat dipastikan, narasi konten

TikTok tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan alias sebuah kebohongan.

Perhatian bersama

Ada beberapa isu dalam kasus ini yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Pertama, pemilik akun @suryaaae0 secara sengaja membuat konten dan menebarkan narasi yang tidak valid. Kita tidak tahu motivasinya, tetapi patut diduga, yang bersangkutan ingin mendompleng peristiwa pencalonan Prof. Mahfud sebagai wakil presiden sehari sebelumnya. Dari 24 konten yang diunggahnya, konten inilah yang mendapatkan paling banyak atensi dari warganet.

Produksi konten yang ditujukan untuk memancing kehebohan ini seperti ini jelas bukan yang pertama. Memori kita tidak begitu sulit mengingat beragam kasus serupa. Beberapa bahkan menjadi kasus hukum atau mendapatkan kritik tajam dari para warganet yang masih waras.

Kedua, media ternyata terjebak pada narasi di media sosial tanpa melakukan tabayun. Dalam konteks ini, berita *kok* berdasar konten TikTok *tok*. Keinginan untuk menggaet pembaca sebanyak mungkin dan hasrat dianggap sebagai yang pertama memberitakan, tampaknya telah menggoda media. Validitas informasi seakan menjadi nomor sekian yang tidak begitu penting.

Tentu, ini merupakan praktik jurnalisme yang mengkhawatirkan karena sudah mengabaikan norma yang seharusnya dijaga: memberitakan fakta. Sudah sangat lama, kita jengah dengan para oknum jurnalis pemalas seperti ini.

Ketiga, kebohongan dalam konten mempunyai beberapa implikasi. Dalam kasus ini, di antaranya adalah pemahaman yang salah yang melahirkan kesan buruk, baik untuk Prof. Mahfud maupun untuk UII sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Sebagai dosen, Prof. Mahfud dianggap tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh program studi untuk membimbing mahasiswa. UII, secara kelembagaan juga dirugikan karena dikesankan tidak menjalankan tugas kendali mutu dengan baik.

Keempat, sebagian warganet mungkin menganggap kebohongan konten tersebut sebagai hiburan semata. Tetapi siapa yang mampu menjamin semua orang beranggapan demikian?

Ingat, tidak semua orang mempunyai elemen kognitif dan personalitas yang sama dalam memproses informasi. Sebagian orang sangat mudah percaya dengan informasi apa pun yang memaparnya, terutama ketika disajikan secara berulang atau emosional. Penerimaan seseorang terhadap kebohongan juga tidak terlepas dari elemen konteks sosial dan psikologis. Reputasi media, otoritas simbolik, atau figur yang menyampaikannya sering kali memberi bobot literal dan legitimasi semu pada informasi tersebut.

Kebohongan terhadap liyan pada hakikatnya adalah pelanggaran atas otonomi individu sekaligus demonstrasi penghinaan terhadap martabat manusia. Dalam ajaran Islam, kebohongan pada dasarnya tidak dibenarkan, kecuali karena tiga alasan yang sangat terbatas: menyenangkan

pasangan, menyelamatkan nyawa, atau mendamaikan pihak yang berseteru.

Sialnya, dampak kebohongan sering kali tidak mudah dibayangkan secara kasat mata, apalagi dalam jangka pendek. Justru karena itulah kebohongan kerap dianggap sepele. Padahal, kebohongan—terlebih yang disengaja dan sistematis—jelas tidak bisa ditoleransi, baik secara moral maupun etis.

*Tulisan sudah tayang dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat
pada 11 November 2023.*

19. Menegaskan Peran Perguruan Tinggi Islam Swasta

Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) baru saja merampungkan Rapat Kerja Nasional di Pekanbaru pada 17-18 November 2023. Acara yang bertempat di Universitas Islam Riau (UIR) ini dihadiri sekitar 80 utusan, yang berasal dari berbagai pojok Indonesia.

Acara didahului dengan pelantikan pengurus masa amanah 2023-2027 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. Jusuf Kalla, yang juga sekaligus Ketua Dewan Penasihat BKSPTIS. Dalam pidato inspirasinya Dr. Jusuf Kalla mengajak PTIS untuk meningkatkan kualitasnya.

Peran penting inklusif

Beragam gagasan dimunculkan, baik dari para pembicara dan juga peserta. Direktur Jenderal Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Dr. Lukman, memaparkan data sebaran PTIS yang memberikan harapan besar. Dari 2.982 perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengabdikan untuk negeri, sebanyak 997 atau sepertiganya adalah PTIS.

Jika sebaran mahasiswa dipukul rata, yang sedang menuntut ilmu di PTIS sekitar 1,5 juta orang. Ini adalah angka yang sangat besar dan mengindikasikan peran penting PTIS dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.

PTIS juga menjadi tempat menimba ilmu mahasiswa dengan beragam latar belakang agama. Bahkan, Universitas Amal Ilmiah (Unaim) yang beroperasi di Wamena, misalnya, lebih dari 90 persen mahasiswanya beragama Kristen. PTIS juga tersebar di semua wilayah Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat 544 PTIS, Sumatera 267, Sulawesi 73, Kalimantan 51, Nusa Tenggara 40, Maluku 9, Papua 8, dan Bali 5. Ini adalah sisi inklusif PTIS yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tentu, kita tidak menutup mata, tingkat kematangan PTIS sangat beragam. Sebagian sudah mapan, sebagian lain masih berkembang. Untuk keperluan pengungkitan kualitas PTIS inilah, BKSPTIS dilahirkan pada 27 April 1978. PTIS diharapkan maju secara bersama untuk mendidik anak bangsa dan menjalankan peran penting lainnya.

Mandiri dan mendunia

Rakernas yang dihelat di Bumi Lancang Kuning ini mengangkat tema "membangun perguruan tinggi Islam yang mandiri dan mendunia". Pilihan tema ini tentu bukan tanpa alasan. Karakter ini diperlukan untuk menegaskan peran peradaban PTIS.

PTIS harus mandiri. Mandiri dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Termasuk di dalamnya, adalah mandiri dalam menjalankan roda organisasinya, kapabel dalam mengembangkan lembaganya, dan mampu menyelesaikan

masalahnya sendiri. PTIS tidak boleh tergantung uluran tangan pihak lain dengan menggadaikan kebebasannya.

Meski demikian, peran pemerintah terus diharapkan untuk dapat menghadirkan ekosistem yang sehat untuk bertumbuh dan berkembangnya PT, termasuk PTIS. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah konstitusi. Kehadiran PTIS, bersama dengan PTS lain, merupakan uluran tangan anak bangsa membantu negara. Negara, dengan alasan apa pun tidak boleh lepas tangan.

Ada sisi kemandirian lain yang perlu mendapatkan perhatian. Mandiri juga dapat dilihat dari kehadiran iklim kebebasan akademik yang sehat. Kampus harus diupayakan untuk tetap menjadi pilar yang steril dari kepentingan jangka pendek dan selalu menyuarakan kebenaran dan membongkar kebohongan. Akal sehat dan perangai ilmiah warga kampus pun harus selalu dijaga, supaya antena akademiknya masih sensitif untuk menangkap sinyal beragam masalah bangsa.

Selain itu, semangat mendunia atau mondialitas harus menjadi bagian cita-cita setiap perguruan tinggi Islam. Ini bukan soal harus mempunyai program, mahasiswa, atau kerja sama internasional saja. Ini adalah perkara peningkatan kualitas dengan standar terbaik, standar yang diakui dunia. Standar ini dapat bercermin dalam banyak aspek, termasuk pola pikir, desain program, sampai pada kualitas eksekusi.

Peta jalan masa depan

PTIS harus menjelma menjadi institusi yang modern jika ingin menjadi salah satu penentu arah peradaban. Masa

depan kolektif PTIS harus didesain dengan serius. Jika tidak, maka orang lain yang akan mendesain masa depannya dan PTIS akan menjadi penonton di pinggiran lapangan.

Berangkat dari kesadaran tersebut, Universitas Islam Indonesia (UII) bekerja sama dengan LP3ES menggagas kelahiran buku yang bertajuk Peta Jalan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Bedah buku ini menjadi pengisi salah satu sesi acara. Peserta memberikan respons yang sangat baik. Banyak harapan digantungkan.

Selain memberikan potret kondisi mutakhir PTIS, buku ini juga menawarkan beragam strategi pengembangan yang bisa dipilih. Strategi ini merupakan pengembangan dari akumulasi tradisi baik yang sudah didokumentasikan oleh banyak PTIS. Faktor kontekstual Indonesia sudah seharusnya masuk dalam radar semua pimpinan PTIS dalam merumuskan masa depan dan mendesain anak tangga untuk mencapainya.

Gagasan yang diusung oleh buku ini, merupakan ikhtiar untuk mengajak para pemimpin PTIS meluangkan waktu sejenak untuk membicarakan hal-hal besar. Dalam beberapa tahun terakhir, pimpinan dan warga PTIS sudah terjebak pada labirin administratif yang seakan tiada ujung.

Hal ini tanpa disadari telah memalingkan perhatian dari diskursus besar terkait dengan peran peradaban yang diemban PTIS. Pengembangan sains yang serius merupakan salah satu pintu masuknya.

Menambah fokus lain di tengah beban berjibun memang tidak selalu mudah. Tetapi ikhtiar seperti ini jangan

sampai ditinggalkan sama sekali. Kerja peradaban ini akan lebih ringan jika dijalankan secara kolektif. Semoga.

Tulisan sudah tayang di [Republika.id](https://republika.id) pada 20 November 2023.

20. Surplus Perasaan

Mengapa berita palsu, informasi salah, atau hoaks bisa menyebar cepat? Ada banyak jawaban. Salah satu jawabannya adalah karena naluri dan emosi telah mengalahkan fakta dan nalar.

Jika ini terjadi, maka akal sehat tergadaikan. Diskusi sehat pun tidak mungkin dijalankan. Pintu bertukar pikiran sudah ditutup rapat.

Sialnya, kasus seperti ini tidak hanya menjangkiti kalangan awam. Kalangan terpelajar pun banyak yang terjerat. Apalagi jika dilengkapi dengan embel-embel kepentingan, yang memudahkan produksi 1001 macam argumen pembenaran.

Bias konfirmasi

Karenanya, ketika ada informasi yang memapar seseorang dan itu mengonfirmasi opini awal yang sudah dipercaya, maka apa pun kualitasnya, informasi tersebut akan dilahapnya tanpa penalaran yang berarti. Inilah yang disebut dengan bias konfirmasi.

Di saat yang sama, informasi lain meski benar, tetapi jika tidak sesuai dengan opini semula, maka akan ditampik.

Sangat sulit bagi orang yang seperti ini untuk berpindah pendirian.

Apesnya, opini awal yang terbentuk pun tidak selalu yang benar. Informasi salah yang memapar bertubi-tubi, akan lebih mudah dipercaya dibandingkan dengan informasi benar yang baru sekali diketahui.

Informasi apa pun yang diberikan oleh orang bercitra baik dan mempunyai tautan emosional baik juga serupa: lebih mudah dipercaya, meski tidak benar dan berlawanan dengan akal sehat. Kerumitan bertambah, ketika banyak pihak yang saling mengklaim sebagai otoritas yang bisa dipercaya. Dalam konstelasi ini, para pihak tersebut termasuk para ahli dengan beragam argumen dan segenap khalayak, terutama warganet.

Hoaks politik

Kekhawatiran di atas akan menemukan banyak bukti di musim kontestasi politik seperti saat ini. Coba simak beberapa informasi yang beredar di dunia maya berikut: Polisi Temukan Gudang Penyimpanan Ijazah Palsu Gibran; Mahfud MD Laporkan Gibran Rakabuming Raka ke KPU; Mendag Zulkifli Hasan Ditangkap Karena Penistaan Agama; Rektor UGM Mengeluarkan Gielbran Muhammad Noor atas Aksi Mengkritik Presiden Jokowi; Gibran Menggunakan 3 Mic pada Debat Cawapres, Berbeda dengan Dua Calon Lain; dan Warga Solo Teriaki Prabowo "Anies Presiden". Semua informasi tersebut dipastikan merupakan hoaks. Situs www.kominfo.go.id sudah menayangkan klarifikasi untuk setiapnya. Bisa jadi, ketika suhu politik semakin menghangat,

produksi hoaks juga meningkat, baik dengan memoles pasangan jagoan atau memfitnah pasangan lawan.

Apa yang terjadi jika hoaks tersebut terus menyebar dan dipercaya oleh semakin banyak orang? Beragam skenario bisa dibayangkan, termasuk suhu politik yang semakin memanas. Bukan karena adu gagasan bernas, tetapi benturan keganasan culas. Semuanya tidak ada yang berakhir indah.

Dalam konteks politik, fenomena di atas telah melahirkan yang oleh Davies (2018) dalam bukunya *Nervous State* disebut sebagai "demokrasi perasaan" (*democracy of feelings*), ketika perasaan semakin mendominasi keputusan manusia. Fakta dimanipulasi untuk memberikan dampak emosional yang maksimum, dan perasaan dimainkan untuk menavigasi perubahan yang sangat cepat.

Bagi Davies (2018), dalam situasi seperti ini, tantangan terbesarnya bukan lagi pada penghormatan kepada kebenaran, karena kebenaran sudah menjadi isu politik. Kebenaran dibuat menjadi relatif dan diputarbalikkan. Alih-alih digunakan untuk resolusi konflik, kebenaran justru digunakan untuk memperuncing konflik.

Informasi yang beredar pun, termasuk hoaks, dianggap sebagai representasi kebenaran. Kecepatan sebaran informasi tersebut semakin dahsyat ketika terjadi di pusaran publik dengan imajinasi paranoid yang tinggi karena perasaan terancam, kesesuaian informasi dengan opini awal yang dimiliki, dan frekuensi informasi yang diterima.

Jika ini yang terjadi, dalam konteks perhelatan politik, kebebasan warga dapat direnggut dengan manipulasi dan

penggiringan opini, sehingga akal sehat menjadi sulit untuk berfungsi. Di sini, terjadi surplus perasaan yang dibarengi dengan defisit penalaran yang akut.

Bagaimana melawannya? Diperlukan gerakan bersama-sama mengedepankan penalaran merdeka yang tidak dikangkangi oleh perasaan tuna nurani. Semuanya penting dilakukan untuk merawat kewarasan kolektif sebagai bangsa.

Tulisan sudah tayang di Kolom Opini Kedaulatan Rakyat 29 Desember 2023.

Bagian 3
Intelektual sebagai Pengarah
Masa Depan

21. Kebebasan Saintifik

Keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) bersyukur atas nikmat yang tak berhenti terlimpah. Selain karena sekarang adalah masa panen dari benih yang sudah ditanam pada waktu lampau, beberapa program percepatan yang didesain dengan mempertimbangkan etika tinggi, alhamdulillah membuahkan hasil. Capaian jabatan profesor bukan hanya merupakan prestasi personal, tetapi juga institusional karena meningkat profilnya.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berbagi perspektif dan mengajak hadirin, terutama profesor baru, untuk membantu mematangkan melalui refleksi lanjutan. Dalam sambutan pendek ini, saya akan membahas kebebasan saintifik.

Mendefinisikan kebebasan saintifik

Ini soal kebebasan saintifik (*scientific freedom* atau *freedom of scientific research*). Kebebasan ini menjadi pilar utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Kebebasan ini adalah fondasi yang memungkinkan para ilmuwan dan peneliti untuk menjelajahi ide, mencari kebenaran, dan berinovasi tanpa hambatan yang tidak perlu.

Bahkan kebebasan saintifik dianggap sebagai kebutuhan demokrasi, hak sipil dan politik, dan salah satu penjamin kesehatan dan kesejahteraan manusia selama tidak menimbulkan dampak buruk bagi orang lain (dikutip oleh Wilholt, 2010).

Ini adalah bagian dari kebebasan akademik (*academic freedom*) yang memiliki cakupan yang lebih luas dan melampaui riset saintifik. Kebebasan akademik mencakup kebebasan anggota komunitas akademik (dosen, peneliti, mahasiswa) di perguruan tinggi yang memungkinkan kinerja efektifnya dalam menjalankan tugasnya, seperti pengajaran, riset, pembelajaran, praktik seni tanpa interferensi atau batasan karena hukum, regulasi, atau tekanan publik yang tidak masuk akal (e.g. Fuchs, 1963).

Beragam argumen

Dalam literatur ditemukan beragam argumen dalam memandang kebebasan saintifik (e.g. Wilholt, 2010; Bayertz, 2006).

Sebagian pemikir (e.g. Wilholt, 2010), mengenalkan argumen epistemologis dan politis. Yang pertama dikaitkan dengan upaya untuk mengorganisasi ikhtiar saintifik kolektif. Yang kedua untuk memastikan bahwa pengetahuan saintifik harus dihasilkan secara independen dari kepentingan politik karena peran penting sains terkait hajat hidup publik.

Pemikir lain (Bayertz, 2006) membagi argumen kebebasan akademik menjadi tiga.

Pertama adalah argumen Aristotelian. Argumen ini mendasarkan pada premis antropologis bahwa manusia pada

dasarnya memiliki rasa ingin tahu, mencari pengetahuan, dan menanyakan apa yang menyatukan dunia. Menurut Aristoteles, karakter alami manusia adalah kebutuhan bawaannya terhadap pengetahuan dan kebenaran, bahkan meski tidak jelas manfaat praktisnya (Bayertz, 2006).

Perspektif ini melihat bahwa pencarian pengetahuan sebagai sebuah kebajikan (*virtue*) dan mengandung etika teleologi terkait dengan kontribusi pengetahuan terhadap kesejahteraan manusia.

Kedua adalah argumen Kantian. Kebebasan saintifik berasal dari fakta bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai persepsi sadar, yang merefleksikan dirinya sendiri dan dunia; namun menonjolkan dimensi kritis rasionalitas dan refleksi manusia. Sains dalam konteks ini dianggap sebagai kendaraan menuju pencerahan (Bayertz, 2006).

Di sini ada penghargaan atas martabat dan otonomi manusia. Kebebasan saintifik menghormati otonomi individu untuk terlibat dalam riset dan membentuk kemandirian intelektual. Kebebasan saintifik, ketika dipandu oleh prinsip etis, berkontribusi pada pengejaran pengetahuan yang universal, memberikan manfaat bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Ketiga adalah argumen Baconian. Argumen ini mengedepankan penggunaan praktis dan perolehan pengetahuan. Prioritasnya tidak lagi pada nilai intrinsik dari kebenaran atau perolehan pencerahan, namun pada potensi industri dari pengetahuan dan perolehan kesejahteraan

material yang terkait dengannya (Bayertz, 2006). Ada ide komersialisasi pengetahuan di sini.

Dalam konteks ini adalah diskusi terkait dengan riset empiris dan penalaran induktif. Kebebasan saintifik memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pengetahuan melalui observasi dan eksperimen sistematis. Selain itu, ada prinsip utilitarianisme pragmatis di sini. Kebebasan saintifik, jika dilakukan dengan tanggung jawab, dapat membawa manfaat praktis bagi masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar.

Jika dirangkum secara sederhana, ketiga argumen tersebut beririsan dalam hal adanya kemajuan, pencerahan, dan kesejahteraan, meski dengan penekanan yang berbeda-beda.

Tantangan dan keterbatasan

Namun, kita bisa boleh menutup mata, jika kebebasan saintifik juga mempunyai tantangan yang harus dimitigasi. Tantangan tersebut termasuk koridor etika, karena riset mungkin memiliki dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan.

Selain itu, aspek ketergantungan finansial dan politik dapat menggadaikan independensi saintifik. Jika terjebak, periset mungkin menerima riset pesanan untuk memberi stempel kepada kebijakan yang tidak selalu berpihak kepada kebaikan khalayak.

Ketidaksetaraan akses terhadap beragam sumber daya dan peluang riset juga menjadi tantangan lain karena dapat menciptakan ketimpangan dalam kebebasan saintifik.

Tanpa ketaatan terhadap koridor etika, Kebebasan saintifik dapat disalahgunakan, seperti dalam kasus riset yang dapat membahayakan keamanan publik. Karenanya, konsekuensi sosial dari kebebasan saintifik harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab.

*Sambutan pada acara serah terima surat keputusan profesor untuk
Prof. Masduki pada 27 November 2023.*

22. Menyuarakan Kebenaran, Mengungkap Kebohongan

Keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) bersyukur atas nikmat yang tak berhenti terlimpah. Pagi ini, seorang kolega kita mendapatkan amanah jabatan baru, sebagai profesor: Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom. Untuk itu, kita semua menyampaikan selamat atas capaian tertinggi dalam kewenangan akademik ini. Profesor bukan gelar akademik, tetapi jabatan yang punya muatan amanah besar yang melekat.

Sampai hari ini, UII mempunyai 41 profesor aktif yang lahir dari rahim sendiri. Surat keputusan yang diberikan hari ini adalah yang kedua di awal 2024 ini, setelah sebelumnya di Januari 2024. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk seterusnya.

Pengangkatan Prof. Tamyiz menjadikan proporsi dosen dengan jabatan akademik profesor mencapai 5,2 persen (41 dari 788 orang). Persentase ini hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional, yang baru 2,61 persen dari sekitar 311.000 dosen.

Saat ini, sebanyak 262 dosen UII berpendidikan doktor (33,2%). Sebanyak 71 berjabatan lektor kepala dan 112

lektor. Mereka semua (183 orang) tinggal selangkah lagi mencapai jabatan akademik profesor.

Jabatan profesor tidak hanya merupakan pencapaian personal semata, tetapi juga mencerminkan dedikasi dan komitmen UII untuk keunggulan akademik. Ini juga merupakan bukti Profesor Tamyiz telah menunjukkan dedikasi yang istikamah dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.

Prof. Tamyiz adalah profesor kedua di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII. Yang menarik, jaraknya sangat panjang dengan SK profesor pertama yang diterima di FIAI UII, yaitu pada 2007, sekitar 13 tahun yang lalu.

Tentu ini bisa menghadirkan beragam diskusi. Mulai dari ketatnya proses yang harus diikuti, sulitnya mengajak para dosen meningkatkan kewenangan akademiknya, atau justru sebuah kesabaran yang perlu dicontoh. ;-)

Tugas intelektual publik

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berbagi perspektif dan mengajak hadirin, terutama para profesor, untuk membantu mematangkannya melalui refleksi lanjutan.

Pada awal 1966, Noam Chomsky, satu dari sedikit intelektual di Amerika Serikat yang masih jernih melantangkan apa yang diyakininya benar secara konsisten, berbicara di depan kelompok mahasiswa Universitas Harvard tentang tanggung jawab intelektual.

Sambutan itu, kemudian diterbitkan satu tahun kemudian, pada 1967 di jurnal mahasiswa Universitas Harvard, *Mosaic*, dan diterbitkan ulang sebagai suplemen di

The New York Review of Books. Pada saat itu, situasi politik di Amerika Serikat sedang menghangat yang dimulai ketika Presiden John F. Kennedy mengeskalasi perang Vietnam.

Dalam sambutannya Chomsky (1967) mengatakan bahwa: *"Adalah tanggung jawab kaum intelektual untuk menyuarakan kebenaran dan mengungkap kebohongan"*.

Dalam bahasa agama, tugas ini adalah amar makruf (menyuarakan kebenaran) dan nahi munkar (mengungkap kebohongan).

Bagi Chomsky (1967), hal ini seharusnya menjadi keniscayaan. Memang tugas ini tidak hanya tanggung jawab intelektual, tetapi menurutnya, intelektual mempunyai posisi istimewa.

"Bagi kelompok minoritas yang memiliki hak istimewa, demokrasi Barat memberikan waktu luang, fasilitas, dan pelatihan untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik tabir distorsi dan misrepresentasi, ideologi dan kepentingan kelas, yang melaluinya peristiwa-peristiwa sejarah terkini disajikan kepada kita."

Tampaknya kita hari ini masih dapat bersepakat, bahwa apa yang disampaikan oleh Chomsky, 58 tahun yang lalu, masih valid.

Tentu, menjadi intelektual seperti yang tergambarkan tersebut bukan tanpa tantangan dan risiko. Setiap dari kita bisa mengimajinasikannya masing-masing, mulai dari risiko yang terlihat abu-abu muda sampai yang gelap pekat.

Fakta di lapangan

Namun, fakta di lapangan memberikan cerita bahwa tidak semua akademisi berani mengambil peran ini, karena beragam alasan.

Selain potensi risiko, di dalamnya termasuk, kurangnya rasa percaya diri, ditambah dengan kegamangan terkait efektivitas gerakan, membuat banyak akademisi enggan terlibat dalam aktivisme.

Pembahasan soal ini dimuat dalam buku peringatan 50 tahun pemikiran Chomsky (Allott et al., 2019).

Saat ini, kita harus jujur akui, semakin sulit menemukan intelektual publik di Indonesia. Saya harus membedakan antara intelektual publik yang berbicara dengan hati dan ketulusan, dan selebritas akademik yang masih gandrung dengan sorot lampu panggung dan penyanjungan, baik dari kolega maupun mahasiswa (lihat misalnya Walsh, & Lehmann, 2021). Jika intelektual publik berfokus pada masalah publik, selebritas akademik lebih cenderung mengedepankan individualisme, dan karenanya dapat merusak nilai-nilai ilmiah (Fleming, 2021).

Menjadi intelektual juga soal konsistensi antara kata dan perbuatan, serta konsistensi sikap dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk ketika jauh dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Rumus ini valid kita semua, termasuk saya. Tentu, bisa jadi sebagian dari kita ada yang langsung mengatakan dalam hati, "tidak mudah".

Itulah tantangan sebuah pilihan sikap dengan semua godaan di depan mata. Tidak mudah. Jika mudah, maka

hadiahnya mungkin hanya jam dinding, gelas belimbing, atau piring cantik. :-)

Kekhawatiran keluar dari garis demarkasi disiplin asal, juga tidak jarang menjadikan banyak akademisi memilih untuk membatasi berbicara dan menulis hanya untuk disiplin ilmu mereka.

Padahal ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu memberanikan diri berbicara dan menulis tentang disiplin ilmu mereka dan menghubungkannya dengan beragam konteks, termasuk sosial, budaya, dan politik. Atau, bahkan ada yang dijadikan simbol atau pelantang pesan supaya berbicara dan menulis tentang isu-isu publik yang sangat mungkin belum tentu terkait dengan bidang keahlian yang ditekuninya.

Saya yakin, pendapat ini akan memicu diskusi menarik.

Ketika saya menulis sambutan ini, saya teringat pidato pengukuhan Prof. Al Makin, yang berjudul retoris: Bisakah menjadi ilmuwan di Indonesia? Saya tentu tidak akan menyampaikan di sini di depan penulisnya,

Saya harus akhir diskusi soal tanggung jawab intelektual ini, bukan karena tidak penting, tetapi supaya menyisakan penasaran di benak semua hadirin untuk meneruskan refleksi. Saya juga khawatir kalau sambutan saya menjadi semacam pidato kunci. :-)

Semoga Allah selalu meridai UII dan kita semua.

*Sambutan pada acara Serah Terima Surat Keputusan Profesor atas nama
Dr. Tamyiz Mukharrom pada 13 Februari 2024.*

23. Transformasi Digital

Waktu berjalan, tuntutan berubah. Apa yang di masa lampau sudah canggih, belum tentu valid untuk hari ini. Begitu juga, apa yang sudah cukup di hari ini, sangat mungkin kedaluwarsa di masa mendatang.

Hukum alam atau sunatullah ini berlaku di banyak konteks, termasuk dalam manajemen perguruan tinggi. Ketiga cacah mahasiswa terbatas, proses manual insyaallah masih memadai. Tetapi ketika mahasiswa sudah sangat banyak dengan proses bisnis yang semakin kompleks, penggunaan teknologi merupakan sebuah keniscayaan.

Teknologi dapat menjadi akselerator lompatan dengan beragam perubahan yang dimungkinkannya. Dalam konteks universitas, teknologi informasi, misalnya, akan memfasilitasi banyak aspek: mulai dari mendukung pelaksanaan proses bisnis, pemberian layanan, sampai dengan pengambilan keputusan.

Ijtihad organisasional

Tidak salah, jika kita menempatkan layanan teknologi informasi sebagai instrumen strategis dalam menjalankan roda universitas. Pilihan menggunakannya hanya sebagai

alat bantu operasional sudah tidak mencukupi. Karenanya, transformasi digital menjadi jalan yang harus ditempuh.

Di Universitas Islam Indonesia (UII), penggunaan teknologi informasi untuk beragam keperluan sudah sangat lama dilakukan. Tetapi teknologi tidak kalis dari hukum alam yang akan kedaluwarsa pada masanya.

Beragam solusi yang sudah dikembangkan di masa lampau telah menunaikan tugasnya. Sudah terlalu banyak manfaat yang sudah diberikan. Kita harus memberikan apresiasi kepada para pengawal dan pengembangnya.

Namun, tuntutan berubah. Pembaruan harus selalu dilakukan. Pada 2016, UII melakukan ijtihad organisasional dalam pengembangan solusi teknologi informasi. Peran Badan Sistem Informasi (BSI) pun didefinisikan ulang. BSI mempunyai tiga peran yang saling melengkapi: pelayan, mitra, dan katalis.

Serangkaian inisiatif lain telah dilakukan: mulai dari audit teknologi informasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan aplikasi terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sampai dengan perbaikan layanan.

Infrastruktur baru digelar. Jaringan kabel optik di lingkungan kampus terpadu diganti. Panjangnya lebih dari 6 km. Teknologi yang dipilih pun semoga masih layak sampai 20 kali ke depan. Ekosistem pusat data diremajakan dan ditingkatkan kapasitasnya. Sistem pengamanan pun diperbaiki.

Untuk distribusi Internet, desain baru diadopsi. UIIConnect merupakan hasilnya. Semua pengguna merasa nyaman karena mendapatkan pengalaman yang serupa.

Tidak ada lagi kasta dalam pelayanan. Sekitar 1.000 titik akses Internet, saat ini, sudah terpasang di semua pojok UII, yang dihubungkan dengan kabel baru yang panjangnya lebih dari 50 km.

Integrasi aplikasi juga dipercepat. UIIGateway menjadi rumah dari modul-modul yang dikembangkan. Solusi legasi secara perlahan kita pensiunkan karena telah rampung menjalankan misinya.

Sampai saat ini, sekitar 40 modul sudah dikembangkan dan akan terus bertambah. Ketika pandemi Covid-19 menyerang di awal 2020, layanan ini sudah teruji untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan dengan baik.

Masa depan

Apakah itu sudah cukup? Tidak. Perubahan terus terjadi, tuntutan selalu mengalir. Masih banyak pekerjaan rumah lain yang menunggu untuk dituntaskan.

Meski demikian, kita perlu membangun optimisme bahwa UII sudah berada di jalan yang benar. Kita insyaallah sudah mempunyai basis terinstal (*installed base*) yang kuat. Beragam layanan baru dapat dikembangkan di atasnya.

Percepatan pengembangan solusi perlu menjadi salah satu fokus ke depan. Penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam mendukung pengembangan solusi sedang dieksplorasi. Ini bukan soal 'gaya-gayaan' supaya terlihat keren karena dianggap mengikuti perkembangan. Ini adalah perkara peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi yang bermakna. Itu pun tidak lantas mengabaikan koridor etika.

Kita semua berharap, di masa depan yang tidak terlalu jauh, semakin banyak layanan yang dapat diberikan untuk beragam pemangku kepentingan: mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, manajemen, sampai dengan mitra dan publik. BSI bekerja keras untuk itu semua.

Apresiasi

Di belakang setiap layanan dengan dukungan infrastruktur yang andal, dipastikan ada orang-orang dengan dedikasi tinggi. Mereka adalah aktor di belakang layar yang sering terlupa diapresiasi.

Mengapa? Sebagai sunatullah, infrastruktur biasanya disadari keberadaannya jika layanannya terganggu. Bayangkan, misalnya jaringan listrik, koneksi Internet, atau layanan UIIGateway, dianggap sebagai sesuai yang seharusnya oleh pengguna. Teriakan dari pengguna akan muncul ketika ada gangguan dalam layanannya.

Menjaga ketersediaan layanan ada 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan, sangat menantang. Kita bersyukur, dengan catatan yang mungkin ada, tim BSI telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawal transformasi digital di UII. Mari, kita terus berikan apresiasi sekaligus masukan, untuk mendorong kinerja BSI yang semakin baik di masa mendatang.

Tulisan sudah dimuat di UIINews edisi November 2023.

24. Kecerdasan Buatan di Kampus, Mau ke Mana?

Dalam beberapa kesempatan, saya mendengar ceramah yang mengajak dunia pendidikan untuk menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence, AI*). Tidak dijelaskan bidang aplikasi spesifiknya.

Di kesempatan yang lain, penceramah berbeda dengan antusias mengatakan jika kampus harus mengadopsi teknologi *blockchain* dan mahadata (*bigdata*). Lagi-lagi, tidak diberikan ilustrasi atau pembuktian konsep tersebut dengan baik.

Kalau pun bidang aplikasi disebutkan, para pembicara tersebut tidak memberikan gambaran yang utuh. Fokus hanya pada sisi teknologi. Padahal teknologi tidak mungkin diimplementasikan dalam ruang hampa. Ada banyak konsiderans lain yang perlu dimasukkan ke dalam radar, termasuk konteks implementasi dan beragam implikasinya.

Dalam sebuah perbincangan, kolega pimpinan perguruan tinggi dengan bangga menyatakan jika kampusnya sudah menggunakan kecerdasan buatan. Yang satu menggunakan avatar untuk memproduksi video pembelajaran dan satunya lagi menggunakan *chatbot* untuk merespons pertanyaan dari publik. Tentu, kedua contoh ini

valid. Tetapi, apakah hanya sebatas itu imajinasi kita? Ada banyak pertanyaan lain yang dapat dimunculkan.

Sonder konseptualisasi

Dari ilustrasi sederhana di atas, paling tidak ada dua isu yang menuntut keawasan kita. Tanpa keawasan ini, warga kampus akan terjebak pada jargon dan terlena tanpa konseptualisasi yang memadai.

Pertama, kecerdasan buatan didefinisikan secara berbeda-beda. Hal ini pun dapat diterima selama setiap definisi menyinggung substansinya. Tentu, untuk menyebut kecerdasan buatan, seseorang pun tidak harus memahami secara teknis bagaimana beragam algoritmanya bekerja. Tetapi, memahami konsep dasarnya tetap diperlukan. Untuk apa? Supaya kita tidak hanya terjebak narasi tanpa mampu memaknainya dengan memadai.

Sebagai ilustrasi sederhana. Saat ini, yang paling populer adalah kecerdasan buatan generatif (*generative AI*) yang dikembangkan berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*) dan mampu menghasilkan teks, video, gambar, dan jenis konten lainnya. Kecerdasan buatan jenis ini disebut "generatif" karena kemampuannya dalam menghasilkan "konten baru", sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, bukan hanya melakukan tugas berdasarkan data yang sudah ada. Dalam konteks ini, data lampau yang digunakan untuk pembelajaran akan mempengaruhi luaran yang diproduksi oleh algoritma yang tertanam.

Kedua, tujuan penggunaan kecerdasan buatan di dunia pendidikan. Apakah untuk sekedar mendapatkan legitimasi

(semu) karena sudah mengadopsinya? Ataukah, untuk tujuan yang lebih mulia: meningkatkan kualitas manajemen, proses pendidikan, atau artefak akademik? Meskipun sah-sah saja menggunakan kecerdasan untuk mendapatkan legitimasi, namun, dampaknya kurang bermakna. Pendekatan seperti ini, tidak jarang mengabaikan beragam dampak ikutannya, yang tidak selalu positif.

Dua isu di atas terkait dengan kampus sebagai pengembang pengguna teknologi yang akan digunakan di kampus. Isu ini juga valid untuk teknologi maju lainnya, termasuk *blockchain* dan *mahadata*.

Ini bukan soal mengadopsinya, tetapi juga harus menakar makna yang dihadapkannya. Bisa jadi, ada yang berpendapat: daripada tidak mengadopsi sama sekali. Tentu saja, pendapat seperti ini juga dibolehkan. Namun, dampaknya ke dunia pendidikan terbuka untuk didiskusikan.

Praktik abu-abu pekat

Di sisi lain, sebagai pengguna, kemudahan yang dihadirkan oleh layanan yang dibangun dengan kecerdasan buatan telah melupakan banyak warga kampus akan dampak negatifnya. Penggunaan ChatGPT, misalnya. Di banyak kesempatan, diskusi lebih banyak diwarnai dengan manfaat yang dihadapkannya. Namun, sangat sedikit yang awas dan memberikan perhatian kepada sisi gelapnya.

Saat ini, misalnya, mahasiswa dapat dengan mudah menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan beragam tugas kuliah. Dosen pun dipastikan kesulitan untuk mendeteksinya.

Ada keputusan di sana, yang diobati dengan dalih: selama tidak ketahuan, tidak apa-apa.

Dosen pun serupa. Mereka menggunakannya untuk membuat artikel, laporan, atau proposal. Terlihat sangat indah dan bermanfaat. Apalagi hanya dengan biaya langganan yang sangat murah.

Kedua ilustrasi di atas merupakan praktik yang dapat memunculkan beragam diskusi etika. Jika ada aspek pendakuan atas karya, praktik ini dapat masuk ke ranah sisi gelap, atau paling tidak abu-abu pekat yang nyaris melanggar garis merah. Tentu, diskusi panjang tentang isu etika dan potensi bias yang mengikutinya dapat dibuka untuk mem bahas nya.

Isu ini pun sudah masuk radar banyak penerbit jurnal bereputasi dan juga lembaga donor. Beberapa kebijakan tertulis pun sudah dibuat untuk menegaskan koridor etika.

Kepedulian yang diharapkan

Karenanya, sambil berikhtiar menguasai teknologi dengan lebih baik, pimpinan dan warga kampus di Indonesia sudah saatnya peduli dengan sisi gelap kecerdasan buatan. Beberapa prinsip dasar berikut dapat membuka diskusi lanjutan.

Pertama, kita sepakat bahwa perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, tidak bisa dibendung. Teknologi maju seperti ini perlu dikuasai dengan baik. Beberapa kampus pun mulai menawarkan program studi spesifik terkait dengan ini.

Kedua, kesadaran dialektika perlu dilantangkan bahwa setiap teknologi selalu hadir dengan dua sisi: positif dan negatif. Kedua hal ini harus dipikirkan bersamaan. Jika tidak, aksi korektif sangat mungkin terlambat untuk dijalankan. Di sini, koridor etika harus dibuat, supaya pengembangan teknologi tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Eksploitasi manusia terhadap liyan dengan bantuan teknologi adalah contohnya.

Ketiga, adopsi kecerdasan buatan harus memperhatikan dampaknya yang bermakna di dunia pendidikan dan tidak sekedar untuk terlihat keren serta mendapatkan pujian. Adopsi teknologi ini seyogyanya bukan lantaran tekanan koersif otoritas yang lebih tinggi atau sekedar mengikuti tren, tetapi karena kesadaran normatif akan dampaknya yang bermakna.

Sebagai penutup, bagi yang pesimis, di satu sisi, kehadiran kecerdasan buatan dikhawatirkan meminggirkan manusia. Tetapi di sini lain, bagi yang optimis, kehadirannya justru dianggap membebaskan manusia dari beragam aktivitas yang menyita banyak waktu. Kesadaran akan isu-isu etika mungkin dapat menjadi penengahnya.

Tulisan sudah tayang di [Republika.id](https://republika.id) pada 23 November 2023.

25. Bingkai Berpikir

Selalu asah dan tambah kecakapan Saudara. Apa yang sudah Saudara kuasai sampai hari ini, insyaallah akan menjadi modal awal untuk berkontribusi dengan beragam peran. Tapi ingat, lingkungan berubah, tuntutan bertambah.

Untuk menjamin relevansi keberadaan Saudara dan untuk memastikan kontribusi terbaik, pilihannya tidak banyak. Salah satunya adalah dengan terus belajar. Dari beragam sumber, dengan berbagai cara.

Salah satu kecakapan masa depan yang sering disebut adalah terkait dengan mahadata. Kita menjadi saksi, bahwa data dan informasi sangat melimpah, sehingga kita tidak mungkin mengunyah semuanya. Jika di masa lampau tantangannya adalah mencari informasi, saat ini berubah, tantangannya adalah menyaringnya, untuk mengambil beragam keputusan.

Kehadiran teknologi mutakhir yang menjadi bagian keseharian, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), juga menjadi bahan diskusi di banyak kesempatan. Sebagian orang menebar ketakutan bahwa teknologi tersebut akan menggantikan peran manusia, sebagian lain melihatnya dengan optimisme. Bagi ahli tekno-optimis, kehadiran kecerdasan buatan tidak menghilangkan peran manusia

tetapi justru membebaskannya: mengotomatiskan aktivitas yang menyita waktu manusia. Manusia bisa menggunakan waktunya untuk hal lain.

Ilustrasi pembuka

Ini soal bingkai. Pilihan bingkai akan mempengaruhi banyak hal dan ini valid untuk banyak konteks.

Berikut adalah sebuah ilustrasi. Prof. Regina Barzilay, ahli kecerdasan buatan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), bersama tim yang latar belakang lintasdisiplin, mengubah bingkai dalam menemukan antibiotik yang membunuh bakteri jahat. Mereka tidak mencari zat yang mempunyai karakteristik serupa dengan zat penyusun antibiotik sebelumnya. Pendekatan lama yang biasa digunakan adalah mencari kemiripan struktural zat.

Mereka mengubah bingkai, yang berfokus pada efek zat: apakah zat tersebut membunuh bakteri? Mereka mengubah isu penemuan antibiotik, dari bersifat biologikal menjadi informasional.

Sebuah algoritma dilatih dengan lebih dari 2.300 senyawa, berharap menemukan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Model yang dihasilkan diaplikasikan pada sekitar 6.000 molekul pada sebuah basis data. Selanjutnya, model diaplikasi pada 100 juta molekul dari basis data lain. Di awal 2020, mereka akhirnya menemukan sebuah molekul pembunuh bakteri.

Berita di media yang muncul adalah bahwa kecerdasan buatan telah menemukan antibiotik. Ada yang salah dengan

perspektif ini karena tidak menggambarkan cerita sebenarnya.

Penemuan ini bukan kemenangan kecerdasan buatan, tetapi kesuksesan kognisi manusia: yang mengubah bingkai dalam menemukan molekul pembunuh bakteri. Apresiasi seharusnya diberikan kepada kecakapan manusia, bukan kepada teknologi baru.

Prof. Barzilay menjelaskan, "Manusialah yang memilih senyawa, mengetahui apa yang mereka lakukan ketika memberikan material kepada model untuk dipelajari". Manusia yang mendefinisikan masalah, mendesain pendekatan, memilih molekul untuk melatih algoritma, dan memilih basis data zat untuk diteliti.

Model mental

Itulah hebatnya bingkai yang mendasari model mental (*mental model*). Model mental ini menjadikan dunia lebih dapat dipahami, karena memungkinkan kita melihat pola, memprediksi kejadian, dan memahami beragam kejadian di depan mata.

Kita menggunakan dalam banyak kesempatan: mulai dari sebagai memilih sekolah, menentukan karier, membangun rumah, menjadi orang tua, dan lain-lain. Bingkai ini bisa berubah. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mempunyai bingkai yang tidak membuka alternatif lain.

Soal kekuatan bingkai ini, dibahas dengan sangat apik dalam buku *Framers* (Cukir, Mayer-Schonberger, & de Vericourt, 2021). Ilustrasi di atas ada di dalam buku ini.

Penulis buku menyatakan jika ingin menggunakan bingkai dengan baik, kita perlu mengaplikasikan pola pikir kausalitas (sebab-akibat), konterfaktual (membayangkan realitas yang berbeda), dan mengenali batasan-batasan.

Dalam suatu waktu, ada kalanya bingkai lama sudah tidak relevan, dan kita perlu merevisinya atau bahkan menggantinya dengan yang sama sekali baru. Selain itu, beragam bingkai mungkin hadir berdampingan.

Bingkai keseharian

Kita bisa menambahkan ilustrasi sederhana untuk menegaskan bahwa bingkai yang tepat akan menjadikan banyak hal menjadi lebih baik.

Bagaimana jika kita melihat beragam masalah dengan bingkai seperti berikut. Kita bersyukur

1. untuk istri yang mengatakan malam ini kita hanya makan mi instan, karena itu artinya ia bersama kita bukan dengan orang lain;
2. untuk suami yang hanya duduk malas di sofa menonton TV, karena itu artinya ia berada di rumah dan bukan di bar, kafe, atau di tempat mesum;
3. untuk anak-anak yang ribut mengeluh tentang banyak hal, karena itu artinya mereka di rumah dan tidak jadi anak jalanan;
4. untuk tagihan pajak yang cukup besar, karena itu artinya kita bekerja dan digaji tinggi.
5. untuk sampah menumpuk selepas pertemuan yang harus kita bersihkan, karena itu artinya keluarga kita dikelilingi banyak teman;

6. untuk pakaian yang mulai kesempitan, karena itu artinya kita cukup makan;
7. untuk rasa lelah, capai, dan penat di penghujung hari, karena itu artinya kita masih mampu bekerja keras;
8. untuk semua kritik yang kita dengar tentang pemerintah, karena itu artinya masih ada kebebasan berpendapat;
9. untuk bunyi alarm keras pukul 04.00 pagi yang membangunkan kita, karena itu artinya kita masih bisa terbangun dan masih hidup; atau
10. untuk ijazah bertumpuk-tumpuk yang harus ditandatangani rektor, karena itu artinya proses pembelajaran berjalan efektif dan mahasiswa menyelesaikannya dengan baik.

Daftar di atas dapat diperpanjang. Bingkai di atas tentu tidak dimaksudkan untuk menjadi pembenar semua tindakan yang tidak produktif.

Saya termasuk yang percaya, bingkai yang tepat akan menjadikan kita lebih produktif dan sekaligus lebih bahagia dalam menjalani hidup.

*Sambutan pada wisuda doktor, magister, sarjana, dan diploma
Universitas Islam Indonesia, 25-26 November 2023.*

26. Bingkai Berpikir Konterfaktual

Surat Keputusan untuk kedua profesor yang diserahkan hari ini (02/04/2024) ibarat THR institusional bagi UII yang diterimakan di penghujung Ramadan. THR selalu menghadirkan kebahagiaan bagi penerimanya. Demikian juga bagi keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII).

Karenanya, saya mengajak semua, terlebih kedua profesor, Prof. Johan Arifin dan Prof. Sutrisno, untuk bersyukur atas nikmat yang tak berhenti terlimpah.

Kita juga menyampaikan selamat atas capaian tertinggi dalam kewenangan akademik ini. Profesor bukan gelar akademik, tetapi jabatan yang punya muatan amanah. Ada amanah besar yang melekat di sana.

Sampai hari ini, UII mempunyai 43 profesor aktif yang lahir dari rahim sendiri. Sampai awal April ini, selama 2024, UII sudah menerima empat SK profesor. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk seterusnya.

Hubungan antartitik sebagai sunatullah

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengajak hadirin untuk melakukan refleksi dan mengembara ke masa lalu. Bukan karena takut menghadapi masa depan, tetapi

untuk mensyukuri beragam peristiwa dan pengetahuan yang kita kumpulkan dan kais di waktu lampau.

Ini soal menghubungkan antartitik (*connecting the dots*). Aktivitas ini tidak dapat dilakukan dengan maju ke masa depan. Ia hanya mungkin menghubungkan titik-titik di lintasan hidup kita yang sudah lewat.

Saya pernah ditanya, jika bisa kembali ke masa lalu, akan memilih waktu yang mana? Saya jawab: saya tidak mau kembali ke masa lalu.

Selain hal itu tidak mungkin dengan teknologi saat ini, apa pun kondisi kita saat ini, tidak terlepas dari pilihan-pilihan keputusan yang kita buat di waktu silam, baik karena pertimbangan matang maupun karena keterpaksaan. Belum tentu juga, jika kita memilih jalur lain dalam lintasan hidup di masa lalu, akan berakhir lebih baik saat ini.

Rangkaian keputusan itulah yang membentuk kita saat ini. Tentu, saya percaya, tidak semua yang kita bayangkan karena keputusan yang kita ambil, berjalan sempurna. Selalu saja ada kejutan dalam kelok lintasan kehidupan. Sebagian membahagiakan, sebagian lainnya menantang.

Bisa jadi, bagi Prof. Johan dan Prof. Sutrisno, lahirnya surat keputusan ini juga merupakan kejutan.

Di sana ada sunatullah, hukum alam, mekanisme semesta, algoritma jagat raya, yang dapat menjelaskan kausalitas, hubungan sebab akibat. Imajinasi kita terhadap hubungan kausalitas ini bisa jadi tidak selalu benar, tetapi ia tetap baik untuk memahami beragam fenomena.

Kausalitas keputusan

Kausalitas adalah salah satu pilihan model dalam pengambilan keputusan. Jika begini, maka begitu. Ada inferensi di sini. Karena ini juga, kita sering membuat beragam skenario yang melibatkan pasangan variabel sebab dan akibat. Setelah melalui evaluasi, dipilih skenario yang diyakini paling baik.

Namun, model tidak akan pernah lengkap, untuk memasukkan semua variabel yang terlibat. Selalu ada penyederhanaan karena beragam sebab, termasuk ketidaklengkapan informasi, kemampuan kognitif yang terbatas, dan waktu yang tidak bersahabat. Akhirnya muncullah konsep rasionalitas terikat (*bounded rationality*).

Hadir juga konsep pengambilan keputusan dalam ketidakpastian (*decision making under uncertainty*). Beragam pendekatan dikembangkan untuk konteks, ini termasuk model probabilitas sampai dengan penggunaan komputer untuk mensimulasikan.

Berpikir kontrafaktual

Pendekatan kausalitas ini bahkan bisa diekstrapolasi ke masa depan. Jika ini diambil, maka diperlukan pemikiran yang kontrafaktual (*counterfactual*), dengan membayangkan realitas alternatif di masa depan. Ini melengkapi model kausalitas deterministik (Cukier et al., 2021).

Beragam perandaian bisa dibuat. Ketika realitas alternatif di pilih, maka kita bisa jadi membayangkan sebab yang lain. Sebab ini bisa menjadi obyek intervensi kita sebagai ikhtiar menghadirkan akibat yang dibayangkan.

Selain itu, berpikir kontrafaktual juga akan menjadikan kita menambah cacah pilihan dan tidak hanya memperdalam satu pilihan. Beragam skenario sebab akibat dapat dihasilkan. Masih banyak manfaat dari berpikir kontrafaktual ini.

Cara berpikir seperti ini, relevan dengan pendekatan berpikir induktif. Ini melengkapi pola pikir deduktif yang banyak mendominasi kita. Pendekatan induktif tidak bermula dari masalah, tetapi dari observasi atau contoh. Dalam konteks organisasi, penalaran induktif dapat berangkat dari pemahaman akan potensi.

Di sinilah peran bingkai (*frame*) menjadi penting. Bingkai bisa dirujuk dengan banyak sebutan, termasuk templat, abstraksi, representasi, atau skema.

Bingkai inilah yang menjadi model mental kita dalam pengambilan keputusan. Bingkai ini akan **memperdayakan** karena kita berfokus kepada pikiran kita, dan sekaligus **membebaskan** karena kita merdeka dalam memilih aspek realitas yang ingin kita tonjolkan (Cukier et al., 2021).

Di lapangan, beragam bingkai bisa saling berkontestasi atau hidup bersama dalam harmoni.

Beberapa ilustrasi

Kita ambil sebuah ilustrasi. Apakah kita sadar bahwa peta yang kita gunakan sehari-hari telah mempengaruhi model mental kita dalam melihat dunia? Peta dengan proyeksi Mercator dengan perluasan wilayah yang semakin dengan kutub, telah menjadikan wilayah negara imperialis

Eropa pada masa lalu terlihat lebih besar dari senyatanya. Ada nilai yang disuntikkan ke dalam peta, yaitu hegemoni.

Peta awalnya digunakan, salah satunya, untuk membantu navigasi pelayaran, tetapi kemudian menjadi instrumen dalam kolonisasi sebuah wilayah.

Tahukah kita bahwa luas Pulau Hijau (Greenland) yang di peta tiga kali luas Benua Australia, ternyata 73,9% lebih kecil dibandingkan yang tergambar di peta (engaging-data.com/country-sizes-mercator/). Luas Rusia senyatanya hanya 53% lebih kecil dari yang terpampang di peta.

Luas Inggris aslinya lebih kecil 41,1% dari yang terproyeksikan di peta. Luas wilayah Amerika Serikat lebih kecil 23% dari yang tergambar di peta. Tapi luas Indonesia malah terdiskon -0,5% dari senyatanya.

Masih banyak contoh lain, yang kita telan mentah-mentah, tetapi sejatinya ada bingkai tersembunyi yang tidak selalu terlihat di awal. Termasuk di dalamnya, algoritma media sosial dan undang-undang/peraturan yang dibuat dengan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam konteks artefak (peta termasuk sebuah artefak), bingkai adalah operasionalisasi dari nilai yang diyakini oleh desainernya.

Sadar bingkai

Mengenalinya orang lain menjadi penting, supaya tidak mudah terkecoh. Termasuk di dalamnya bingkai yang berkembang ketika musim pemilu yang sekarang masih belum final.

Bingkai yang digunakan untuk melihat amanah profesor pun akan mempengaruhi pilihan aktivitas akademik dan kerja intelektual masa depan setiap pemegangnya.

Prof. Sutrisno, mempunyai bingkai menarik terkait ini, dengan menyatakan: “Syukur alhamdulillah di masa *injury time* (menjelang pensiun), masih diberi kesempatan untuk lebih lama mengabdikan menjadi guru besar di UII”. Ini bukan hasil wawancara, tetapi hasil pantauan atas status Facebook yang bersangkutan.

Semoga amanah profesor ini menjadi pembuka berjuta pintu keberkahan, tidak hanya bagi pribadi dan keluarga, tetapi juga institusi dan publik.

Sambutan pada acara serah terima Surat Keputusan Profesor atas nama Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. dan Dr. Drs. Sutrisno, S.E., M.M. di Universitas Islam Indonesia pada 2 April 2024

27. Peran Doktor

Menyambut para doktor baru di setiap penghujung tahun merupakan momen yang membahagiakan. Kali ini, sebanyak 18 dosen Universitas Islam Indonesia (UII) telah menyelesaikan studi doktor. Kehadiran mereka menggenapi dosen berpendidikan doktor menjadi 258 orang atau 32,65% dari keseluruhan 790. Saat ini, sebanyak 180 dosen masih dalam studi doktor.

Dari 18 doktor baru tersebut, 13 di antaranya mendapatkan beasiswa luar UII, baik penuh maupun parsial. Sebanyak 10 orang menempuh di berbagai universitas dalam negeri, sedang delapan menyelesaikan di beberapa negara, termasuk Taiwan, Jepang, Austria, Australia, Malaysia. Yang lebih menggembirakan, sebanyak 5 di antara mereka adalah doktor perempuan.

Peran baru

Kehadiran 18 doktor baru akan memperkuat UII untuk semakin meningkatkan kualitas dalam menjalankan misinya: pembelajaran, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiah. Pelatihan selama menjalani program doktor tentu akan membuat mereka menjadi manusia baru. Mereka mendapatkan pengalaman

akademik yang lebih kaya, perspektif yang makin luas, horizon pemikiran yang bertambah jauh, dan juga diharapkan, sensitivitasnya terhadap beragam masalah juga semakin tajam.

Untuk mencapai dan menguatkan itu semua, saya mengajak semua doktor baru, tentu juga termasuk pada doktor lama, untuk

- a. membuka diri berkolaborasi dengan dosen dan periset dari disiplin dan lembaga lain;
- b. menguatkan koneksi disiplin yang ditekuni dengan masalah nyata di lapangan;
- c. mengedukasi publik luas dengan konsep disiplin yang ditekuni dengan bahasa awam; dan
- d. meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam artian yang sangat luas, mulai kecakapan mengembangkan ide, adaptasi, komunikasi, mendengar, hubungan personal, eksekusi, sampai dengan berlatih merendahkan ego personal. Kemampuan kepemimpinan juga mengharuskan seseorang untuk membiasakan diri melihat hutan dan tidak hanya melihat satu pohon, melihat konteks lebih komprehensif dan tidak parsial.

Kemampuan adaptasi

Ada isu penting terakhir yang ingin saya sampaikan kepada semua doktor baru, yang belajar di berbagai universitas dengan keragaman tradisi dan fasilitas. Kemampuan itu adalah adaptasi.

Tidak bisa disalahkan, ketika semuanya membayangkan UII mempunyai hal-hal baik yang

ditemukan di kampus masing-masing ketika menempuh studi doktoral. Namun, semua bayangan itu tidak selalu sudah tersedia di lapangan.

Pilihannya dua: (1) kita selalu mengeluhkan tradisi dan fasilitasi yang mungkin berbeda, atau (2) terlibat aktif membuat masa depan bersama seperti yang kadang dibayangkan.

Saya tentu berhadap yang kedua. Dengan demikian, masa proses adaptasi bisa dijalankan dalam damai dengan tetap menjaga hangat mimpi masa depan kolektif untuk bersama-sama diwujudkan. Di sini kadang perlu waktu dan momentum.

Sekali lagi selamat, dengan iringan doa semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi bisa terpancar luas untuk menyinari kampus dan khalayak yang lebih luas.

*Sambutan pada acara penyambutan doktor baru
Universitas Islam Indonesia lulusan 2023, 21 Desember 2023.*

28. Membingkai Dunia

Di saat kita merayakan pencapaian ini, izinkan saya berbagi beberapa pemikiran yang diambil dari buku *Framers: Make Better Decisions in the Age of Big Data* (Cukier, Mayer-Schönberger & de Vericourt, 2021) yang bisa menjadi panduan bersama.

Mengapa saya mengutip buku? Saya ingin mengirim pesan tentang arti penting membaca buku dan literatur lain.

Setiap buku adalah guru yang diam, memberi kita pelajaran hidup tanpa batas waktu dan ruang. Di saat yang sama, buku adalah teman yang setia, yang selalu siap menginspirasi dan menuntun kita kapan pun dibutuhkan.

Buku membentuk pikiran yang tajam dan hati yang terbuka; membaca adalah investasi terbaik untuk masa depan. Membaca buku bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tapi juga tentang memperkaya jiwa dan memperhalus cara pandang kita terhadap dunia.

Bingkai pengambilan keputusan

Mari kembali ke buku *Framers*. Dalam kehidupan ini, keputusan yang kita buat tidak hanya ditentukan oleh data atau fakta yang ada di hadapan kita. Sebaliknya, keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh *cara kita membingkai masalah*—

bagaimana kita memahami dan menafsirkan situasi. Cara kita ‘membingkai’ ini adalah kemampuan yang sangat manusiawi, yang melibatkan pemikiran kreatif, intuisi, dan imajinasi. Kemampuan kita untuk membingkai masalah dengan baik tetap menjadi kunci dalam pengambilan keputusan.

Pembingkaian (*framing*)—atau cara kita memandang dunia—adalah lensa yang menentukan mana aspek dari sebuah masalah yang perlu kita perhatikan dan mana yang bisa kita abaikan. Apa yang tampaknya sulit atau membingungkan bisa menjadi lebih sederhana hanya dengan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, saya mengajak Saudara untuk terus membangun kerangka berpikir yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah di masa depan. Sebuah kerangka yang tidak hanya melihat masalah secara dangkal, tetapi juga mampu menemukan *kausalitas*—atau hubungan sebab-akibat—dalam setiap keputusan yang Saudara buat.

Di saat Saudara menghadapi pilihan-pilihan penting dalam karier dan kehidupan pribadi, jangan lupa untuk mempertimbangkan *counterfactuals*—yaitu, berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan lain. Apa yang akan terjadi jika pilihan berbeda yang diambil? Pertanyaan "Bagaimana jika?" ini membantu kita melihat dunia secara lebih luas dan menyadari bahwa setiap keputusan memiliki banyak jalur alternatif.

Memfaatkan batasan

Jangan takut pada *batasan* yang Saudara hadapi. Batasan (*constraints*), bukanlah halangan, melainkan peluang untuk berpikir kreatif. Dalam dunia yang serba terbatas, sering kali justru kreativitas tumbuh. Dan dengan kemampuan Saudara untuk *reframing*—melihat kembali masalah dari perspektif baru—Saudara bisa menemukan solusi-solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

Belajar (*learning*) adalah kunci untuk membangun kerangka berpikir yang lebih baik. Pengalaman hidup akan terus memberikan pelajaran berharga, dan penting bagi Saudara untuk terus mengasah kemampuan dalam membingkai masalah secara efektif. Belajar dari kesalahan, mengubah cara berpikir, dan berkembang adalah bagian dari perjalanan yang akan Saudaraalui.

Di dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penting untuk tidak terpaku pada satu cara pandang saja. Saudara harus menghargai *pluralisme*, yaitu kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Keputusan terbaik sering kali dihasilkan dari kombinasi berbagai perspektif dan pandangan. Jangan ragu untuk mendengarkan ide-ide yang beragam dan terbuka terhadap cara berpikir yang baru.

Namun, di tengah semua ini, tetaplah *waspada* terhadap kerangka berpikir Saudara sendiri. Kewaspadaan (*vigilance*)—adalah kemampuan untuk terus menguji dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang Saudara buat. Jangan sampai terjebak dalam keyakinan bahwa satu cara pandang sudah pasti benar. Dunia ini terus berubah, dan kita juga

harus fleksibel dalam cara kita berpikir dan mengambil keputusan.

Di hadapan Saudara terbentang masa depan yang penuh dengan peluang, tetapi juga tantangan. Saya percaya bahwa dengan kemampuan untuk membingkai masalah dengan baik, terus belajar, serta berpikir secara pluralis dan waspada, Saudara akan mampu membuat keputusan yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan dunia di sekitar Saudara.

*Sambutan pada acara wisuda Universitas Islam Indonesia pada
28 September 2024.*

29. Progres Mondial

Karakter mondial atau internasional sudah disematkan kepada Universitas Islam Indonesia (UII) sejak berdirinya. Simak saja, misalnya, naskah kesanggupan para pelajar (ikrar mahasiswa) Sekolah Tinggi Islam (STI), nama awal UII, berikut:

Kesanggupan Para Pelajar

Kami pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, mengikrarkan janji dan membulatkan niat akan mencurahkan segenap tenaga kami dalam menuntut ilmu-ilmu yang diajarkan pada Sekolah Tinggi ini serta menjunjung tinggi akan akhlak dan budi pekerti Islam, agar kami dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi muslim Indonesia yang utama dan anggota yang berguna bagi masyarakat Indonesia, sejajar dengan lain-lain bangsa di Asia Timur Raya, serta dapat menunaikan kewajiban kami sebagai pemimpin Islam Indonesia pada masa yang akan datang sesuai dengan amanat yang dipesankan oleh P.Y.M. Gunseiken dan Tuan Rektor kami.

Terasa sekali di dalamnya ada semangat mondial yang tercermin dalam frasa "sejajar dengan lain-lain bangsa di Asia Timur Raya". Pesan serupa disampaikan oleh Bung

Karno ketika pembukaan STI. Saat itu, Bung Karno yang mewakili Jong Java mengharapkan "hendaknya Sekolah Tinggi Islam ini menjadi pusat, sumber pengetahuan, keislaman dari seluruh Asia, seperti juga dahulu Nalanda (Sriwijaya) pernah menjadi pusatnya ilmu pengetahuan tentang agama Budha".

Ketika STI dibuka, bangsa Indonesia masih dalam suasana yang serba terbatas. Tetapi, pemikiran para pendiri telah melampaui zamannya.

Merawat semangat

Ikhtiar mondialisasi terus dilakukan. Terbukti, misalnya, pada 1950an, ketika masih seumur jagung, UII telah menjalin kerja sama dengan beberapa universitas kelas dunia, seperti Columbia University (Amerika Serikat), McGill University (Kanada), Punjab University (Pakistan), King Fuad I University yang berubah nama menjadi Cairo University (Mesir), dan Farouk I University yang berganti julukan menjadi Alexandria University (Mesir).

Semangat menjadikan UII sebagai universitas berkelas internasional juga tercermin dalam rumusan visi bagian akhir "setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju." Ini adalah ikhtiar mempertahankan karakter penting UII.

Beragam prestasi kolektif telah didokumentasikan. Pembukaan program internasional di UII pada pertengahan 1990an merupakan langkah yang perlu diapresiasi, ketika belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang

memikirkannya. Bahkan, saat itu, beberapa perguruan tinggi negeri melakukan studi tiru ke UII.

Mobilitas internasional

Saat ini, UII sudah menjalankan 15 program internasional, dengan bahasa Inggris atau Arab sebagai pengantar. Selain sebagai ikhtiar menarik mahasiswa internasional, program ini juga menjadi pilihan mahasiswa domestik yang ingin mendapatkan atmosfer internasional.

Upaya ini juga dilengkapi dengan menarik mahasiswa internasional untuk melakukan studi di UII. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya cukup menggembirakan, baik dari sisi cacah mahasiswa internasional maupun cakupan negara.

Pada 2023 ini, sebanyak 135 mahasiswa internasional menempuh program bergelar di UII, baik untuk tingkat sarjana, magister, maupun doktor. Mereka berasal dari 24 negara, baik dari benua Asia (Thailand, Singapura, Pakistan, Turkmenistan, Palestina, Suriah, Afghanistan, Yaman, Jordan, dan Irak), Afrika (Maroko, Mesir, Sudan, Uganda, Libya, Liberia, Nigeria, Somalia, Niger, Gambia, dan Aljazair), maupun Eropa (Prancis, Jerman, dan Inggris).

Mahasiswa internasional peserta program non-gelar jauh lebih baik. Pada 2023, misalnya, peserta mendekati 500 orang, baik yang mengikuti program jangka pendek maupun transfer kredit. Bahkan, pada 2022, cacah peserta melebihi 1.500 orang.

Selain itu, UII juga mengirim mahasiswanya mengikuti mobilitas internasional, baik dengan mengikuti program

jangka pendek, transfer kredit, maupun gelar ganda. Program ini termasuk yang melalui pendanaan universitas mitra, mandiri, maupun melalui skema *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA).

Kolaborasi internasional

Sejak beberapa tahun terakhir, UII terlibat dalam beberapa konsorsium internasional yang mengerjakan program-program spesifik berdasarkan kesepakatan anggota. Sejak 2016, UII sudah terlibat dalam sembilan konsorsium.

Konsorsium ini melibatkan universitas atau lembaga di Eropa dan juga Asia, termasuk Indonesia. Secara umum, ada dua macam program yang diusung: peningkatan kapasitas dan mobilitas. Program ini melibatkan mahasiswa dan dosen.

Program tersebut didanai oleh Uni Eropa melalui skema Erasmus+ maupun Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Pembentukan konsorsium ini membantu UII melebarkan sayap mondialnya. Ini adalah indikasi progres yang perlu ditingkatkan.

Selain kolaborasi institusional, penting juga untuk menyebut jaringan personal para dosen UII dalam melakukan beberapa kegiatan bersama, terutama riset dan publikasi. Kolaborasi personal merupakan bagian penting untuk mondialitas sebuah universitas. Karenanya, sivitas kampus perlu meningkatkan kapasitas diri menjadi warga global.

Tentu, perlu dicatat bahwa memberi perhatian kepada mondialisasi, tidak berarti melupakan penguatan kolaborasi

nasional. Keduanya ibarat sayap yang saling melengkapi, untuk menjadikan UII dapat terbang tinggi.

Tulisan sudah tayang di UIINews edisi Desember 2023.

30. Apa yang Kau Cari di UII?

Milad ke-81 Universitas Islam Indonesia (UII) mengangkat tema Dedikasi untuk Negeri. Sejatinya tidak ada yang istimewa dalam tema ini, kecuali jika tema ini dilihat sebagai pengingat dan penegasan atas tujuan didirikannya UII, yang dulunya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) pada 27 Rajab 1364 yang bertepatan dengan 8 Juli 1945.

Komitmen kelembagaan

UII dan negeri ini dilahirkan dari rahim yang sama dan telah berkembang bersama. Sejak berdirinya, UII tidak pernah diniatkan untuk berusia pendek, tetapi terus lestari selama Indonesia masih tegak berdiri. Tidaklah berlebihan untuk berharap jika nilai-nilai yang diyakini para pendiri bangsa terus diikhtiarkan untuk dirawat di kampus ini.

Warga UII terus diingatkan akan komitmen keindonesiaan yang berjalan beriringan dengan komitmen keislaman. Kedua komitmen ini tak lengkap, dan terasa hambar dan bahkan bisa salah arah, tanpa komitmen keilmuan. Ketiga komitmen itulah yang diikat secara simbolik di dalam UII: universitas islami indonesiawi.

Renungan di atas bersifat kelembagaan untuk seharusnya menjadi perhatian semua warga UII. Tanpa

kerja kolektif lintasgenerasi secara konsisten, komitmen di atas akan menjadi penghias buku sejarah dan ruang-ruang ceramah. Tentu, semua warga UII tidak ingin ketiga komitmen tersebut menjadi sekedar romantisisme sejarah yang indah dikenang tanpa bukti konkret di lapangan.

Motivasi personal

Komitmen kelembagaan tersebut tak mungkin bisa dirawat tanpa peran para warga kampus. Mendefinisikan peran yang lebih teknis setiap warga, karenanya diperlukan. Semuanya itu, sampai level tertentu, akan sangat dipengaruhi oleh motivasi setiap warga yang saat ini bergiat di UII.

Motivasi ini seharusnya melingkupi, tidak hanya yang bersifat eksoterik, seperti yang terlihat dan dipahami oleh awam, tetapi juga esoterik, yang di sana ada rahasia yang tidak selalu kasat mata.

Perenungan saya menemukan, paling tidak empat motivasi yang seharusnya bersifat **akumulatif** untuk memberikan dampak yang signifikan dari kehadiran setiap warga kampus. Bisa jadi, bagi sebagian warga kampus, ada motivasi yang terlihat lebih dominan pada suatu masa, tetapi akan berbeda tingkatannya di masa yang lain.

Motivasi pertama sangat mungkin yang paling terlihat dan kasat mata. Semuanya sepakat. Jika motivasi pertama ini ditiadakan, bahkan mungkin orang tidak akan percaya. Motivasi pertamanya adalah mencari *ma'isyah* atau penghidupan.

Niat awal para dosen dan tenaga kependidikan bergabung dengan UII adalah memperoleh pendapatan

yang halal. Alasan yang sangat wajar. Pilihan bekerja di kampus tentu dibarengi dengan sebuah kesadaran terkait dengan penghargaan yang tidak sangat besar.

Saat ini, UII telah menjadi tempat mencari penghidupan sekitar 2.500 orang. Jika setiap orang mempunyai pasangan dan dua anak, maka sekitar 10.000 orang "bergantung" kepada UII. Ini merupakan amanah besar yang harus dipikirkan oleh pimpinan. Semuanya akan terasa ringan jika mendapatkan dukungan kolektif semua warga.

Ketika seorang warga sudah menyatu dengan proses keseharian, berinteraksi dengan beragam orang, biasanya akan mungkin kesadaran baru yang menjadi motivasi kedua: membangun *ukhuwah*. Di sana sering kali tidak hanya sekedar pertemanan, tetapi meningkat menjadi persahabatan, dan bahkan persaudaraan.

Karenanya, hubungan yang harmonis selalu diupayakan, meskipun tidak terjebak dalam pola pikir naif, bahwa konflik tidak boleh ada. Politik kantor yang memicu konflik tidak bisa dilepaskan dalam konteks berorganisasi. Dalam kasus ini, semangat kolegialitas harus dikedepankan.

Jangan sampai konflik bersifat personal yang merusak harmoni. Jika konflik terjadi, pastikan itu terkait dengan tugas atau tanggung jawab, termasuk di dalam pilihan strategi. Itu pun perlu dipastikan jika konflik terjadi dalam kadar yang masih dapat dikelola dan tidak sangar liar. Konflik seperti ini justru menjadi katalis perubahan dan menyehatkan, karena akan sangat bermanfaat untuk menguji ide dan merapikan langkah.

Motivasi ketiga yang menguatkan, terutama ketika harapan tidak selalu terpenuhi, adalah mengharap *barakah* atau keberkahan. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan (*ziyadatulkhair*). Bisa jadi, nominal penghasilan yang dihasilkan tidak banyak, tetapi dengan keberkahan semuanya menjadi cukup, karena semua anggota keluarga sehat dan beragam kemudahan hidup didapatkan.

Bentuknya bermacam-macam. Termasuk kesehatan seluruh anggota keluarga, pasangan yang setia, anak yang berbakti, sahabat yang mendukung, tetangga yang suka menolong, pekerjaan yang tuntas, dan lain-lain.

Keberkahan bisa didapat, di antaranya dengan banyak bersyukur dan tidak kebanyakan gaya. Menurut hukum fisika: gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya, biasanya sedang banyak tekanan :-)

Terakhir, motivasi paripurna warga UII adalah merindukan *jannah* atau surga. Tujuan esoteris didasari kesadaran bahwa semua aktivitas yang dilakukan, termasuk meneliti, mengajar, mengabdikan kepada masyarakat, melayani mahasiswa, merupakan bagian dari penghambaan kepada Allah.

Kita sudah terlanjur jadi manusia. Manusia bersifat abadi, karena akan selalu ada

bahkan setelah kematian, meskipun bermula dari ketiadaan. Surga adalah tempat menikmati sisa waktu menjadi manusia dalam waktu yang tidak terbilang, dan semuanya tergantung kualitas kerja kita di dunia, termasuk ketika menjadi warga UII.

Semua motivasi tersebut dapat dirangkum menjadi empat "ah": *ma'isyah, ukhuwah, barakah, dan jannah*.

Elaborasi ringan dari sambutan pada Jalan Sehat dalam rangka Milad-81 Universitas Islam Indonesia, pada 4 Agustus 2024.

31. Meninggalkan Jejak

Izinkan saya mengajak para wisudawan untuk melakukan refleksi singkat tentang arti penting meninggalkan jejak. Setiap dari kita pasti memainkan peran, kadang tunggal dan tak jarang berganda, beragam peran dimainkan di waktu yang sama.

Menjalankan peran

Apa pun peran itu, baik di ruang publik maupun wilayah privat, pastikan kita selalu berikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Memang kadang, tidak semua harapan akhirnya mewujudkan, karena beragam faktor yang terlibat. Tetapi, saya termasuk yang percaya bahwa kerja dengan sepenuh hati, meski hasilnya belum seperti yang diharapkan, tidak akan menimbulkan penyesalan. Kerja manusia tidak hanya dicatat ujungnya, tetapi juga kualitas prosesnya.

Proses inilah yang harus menjadi perhatian setiap saat. Tanpa perhatian penuh, kita bisa terjebak pada angan-angan tinggi, yang tak jarang menjauhkan kita dari melakukan ikhtiar yang seharusnya. Apa yang dilakukan oleh para koruptor, misalnya, juga karena ini. Mereka mengangankan

menjadi kaya, tetapi tidak mau melalu tangga kerja keras, dan akhirnya mengabaikan etika dan melanggar hak liyan.

Keseriusan dalam mengerjakan setiap peran juga yang akan diingat oleh orang lain. Sebagai manusia biasa yang tidak kalis kesalahan, jangan heran jika orang lain akan mengingat yang paling terbaru atau yang terakhir. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya mendapat akhir terbaik, husnulkhataimah.

Konsistensi proses

Konsistensi dalam proses sejatinya merupakan ikhtiar ke sana. Jika orang selalu menebar kebaikan, insyaallah akan diwafatkan dalam kondisi serupa. Begitu juga sebaliknya. Kita berharap kebiasaan yang baik akan terbawa sampai akhir hayat.

Itulah mengapa, dalam tradisi Nahdlatul Ulama, yang diperingati dari seorang muslim yang sudah wafat adalah hari kematian, dan bukan hari kelahirannya. Berbeda dengan Nabi Muhammad saw. yang diperingati hari lahirnya. Rasulullah sejak lahir bersifat maksum yang terjaga dari berbuat maksiat.

Berbuat baik untuk meninggalkan jejak juga tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana pun, kapan pun. Tidak perlu menunggu orang lain melakukan hal serupa. Ibrah atau pelajaran yang diberikan oleh Allah Swt. dalam surat An-Nahl ayat 66 sangat menarik untuk direnungkan. Ayat tersebut berarti:

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.” (QS An-Nahl 66)

Kita harus terus berikhtiar secara konsisten menjadi susu, meski kita dikelilingi darah dan kotoran. Adagium yang mengajak kita menjadi tidak waras supaya kebagian (*saiki zaman edan, yen ora edan, ora keduman*), harus dilupakan. Jika kita ikuti adagium ini, maka kita akan berubah menjadi kotoran.

Konfirmasi dari orang lain memang kadang diperlukan, tetapi tidak selalu. Allah Swt. juga akan menjadi saksi yang tidak akan melewatkan hal terkecil sekalipun. Perintah Allah Swt. dalam surat At-Taubah ayat 1-5, menegaskan.

“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” (QS At-Taubah 105)

Pandai bersyukur

Di kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak semua wisudawan untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan yang sudah kita terima. Kita tak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang diberikan Allah Swt.

kepada kita, baik langsung maupun melalui perantara orang lain.

Karena itu, tetaplah kita berikhtiar menjadi hamba yang taat. Selain itu, bergaullah dengan orang lain dengan baik. Sampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung Saudara dengan beragam ikhtiar yang kadang di luar kadar yang bisa dibayangkan.

Ungkapan terima kasih juga layak diberikan kepada mereka yang pernah bertemu dalam lintasan hidup Saudara, termasuk para guru, kerabat, dan sahabat. Mereka semua mempunyai andil dalam mengantarkan Saudara sampai pada kondisi saat ini. Pandai bersyukur dan berterima kasih merupakan kecapakan yang harus selalu diasah.

Sambutan acara wisuda Universitas Islam Indonesia pada 27 & 28 Juli 2024.

Referensi

Catatan: Beberapa referensi langsung dituliskan di dalam teks.

- Abrahamson, E., & Freedman, D. H. (2013). *A perfect mess: The hidden benefits of disorder*. Hachette.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Penguin.
- Allott, N., Knight, C., Smith, N., & Chomsky, N. (2019). *The responsibility of intellectuals: Reflections by Noam Chomsky and others after 50 years* (p. 156). UCL Press.
- Areily, D. (2023). *Misbelief: What makes rational people believe irrational things*. Heligo Books.
- Ariely, D. (2009). *Predictably irrational: The hidden forces that shape our decision*. Harper.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2023a). *Gini ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388*. Tersedia daring: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2023b). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Tersedia daring: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Cain, S. (2012). *Quiet: The power of introverts in a world that can't stop talking*. Crown.
- Chomsky, N. (1967). A special supplement: The responsibility of intellectuals. *The New York Review of Books*, 23.
- Chomsky, N. (2017). *The responsibility of intellectuals*. The New Press.
- Church, I. M., & Barrett, J. L. (2016). Intellectual humility. In *Handbook of humility* (pp. 78-91). Routledge.
- Colombo, M., Strangmann, K., Houkes, L., Kostadinova, Z., & Brandt, M. J. (2021). Intellectually humble, but prejudiced people. a

- paradox of intellectual virtue. *Review of Philosophy and Psychology*, 12, 353-371.
- Cukier, K., Mayer-Schönberger, V., & de Véricourt, F. (2021). *Framers: Make better decisions in the age of big data..* Penguin.
- Davies, W. (2018). *Nervous states: Democracy and the decline of reason*. New York: WW Norton & Company.
- Dondi, M., Klier, J., Panier, F., & Schubert, J. (2021). *Defining the skills citizens will need in the future world of work*. Tersedia daring: <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work>
- Fleming, P. (2021). *Dark academia*. Pluto Press.
- Freedman, M. H. (1986). The professional responsibility of the law professor: Three neglected questions. *Vanderbilt Law Review*, 39(2), 275-286.
- Gladwell, M. (2006). *Blink: The power of thinking without thinking*. Penguin.
- Gladwell, M. (2013). *David and Goliath: Underdogs, misfits, and the art of battling giants*. Little, Brown.
- Grossmann, I., Weststrate, N. M., Ardelt, M., Brienza, J. P., Dong, M., Ferrari, M., ... & Vervaeke, J. (2020). The science of wisdom in a polarized world: Knowns and unknowns. *Psychological inquiry*, 31(2), 103-133.
- Guriev, S., & Treisman, D. (2022). *Spin dictators: The changing face of tyranny in the 21st century*. Princeton University Press.
- Krumrei-Mancuso, E. J. (2017). Intellectual humility and prosocial values: Direct and mediated effects. *The Journal of Positive Psychology*, 12(1), 13-28.
- Krumrei-Mancuso, E. J., Haggard, M. C., LaBouff, J. P., & Rowatt, W. C. (2020). Links between intellectual humility and acquiring knowledge. *The Journal of Positive Psychology*, 15(2), 155-170.
- Leary, M. R., Diebels, K. J., Davisson, E. K., Jongman-Sereno, K. P., Isherwood, J. C., Raimi, K. T., ... & Hoyle, R. H. (2017). Cognitive and interpersonal features of intellectual humility. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(6), 793-813.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Osborne, G., & Wilton, S. (2017). Professing in the local press: Professors and public responsibilities. *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 10(1), 67-80.
- Plato (2012). *The republic*. Terjemahan Benjamin Jowett. Capstone.
- Popper, K. R. (1963). Science as falsification. *Conjectures and refutations*, 1(1963), 33-39.

- Porter, T., & Schumann, K. (2018). Intellectual humility and openness to the opposing view. *Self and Identity*, 17(2), 139-162.
- Porter, T., Elnakouri, A., Meyers, E. A., Shibayama, T., Jayawickreme, E., & Grossmann, I. (2022). Predictors and consequences of intellectual humility. *Nature Reviews Psychology*, 1(9), 524-536.
- Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?*. Penguin UK.
- Scharffs, B. G., & Welch, J. W. (2005). An analytic framework for understanding and evaluating the fiduciary duties of educators. *BYU Education & Law Journal*, 4, 159-229.
- Sunstein, C. R. (2021). *Liars: Falsehoods and free speech in an age of deception*. Oxford University Press.
- Surowiecki, J. (2009). *The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few*. Abacus.
- Taleb, N. N. (2007). *The black swan: The impact of the highly improbable*. Random House.
- Thaler, R., & Sunstein, C. (2009). *Nudge*, Penguin.
- Walsh, P. W., & Lehmann, D. (2021). Academic celebrity. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 34, 21-46).
- Whitcomb, D., Battaly, H., Baehr, J., & Howard-Snyder, D. (2017). Intellectual humility. *Philosophy and Phenomenological Research*, 94(3), 509-539.

Bukan tanpa alasan buku ini mengambil judul **Menjaga Akal Sehat Kampus**. Kampus dipahami sebagai sebuah ekosistem hidup, tempat pengetahuan, nilai, dan kekuasaan saling berkelindan. Salah satu komponen terpenting dalam ekosistem ini adalah para intelektual. Dalam situasi sosial dan politik yang semakin bising, intelektual memikul tanggung jawab untuk menjaga akal sehat—akal yang jernih, merdeka, kritis, dan tidak mudah terseret arus pragmatisme atau kepentingan sesaat.

Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini menyoal beragam isu yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian, semuanya dikaitkan dengan peran intelektual di ruang publik maupun di lingkungan kampus: penjaga nilai, pengkritik sistem, dan pengarah masa depan.

